

PAPARAN KEPALA BAPPEDA

Disampaikan Pada :

FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

Padang Aro 26 Februari 2024

SUBSTANSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bab I. Pendahuluan

- ❖ Latar Belakang
- ❖ Dasar Hukum Penyusunan,
- ❖ Hubungan Antar Dokumen
- ❖ Maksud dan Tujuan
- ❖ Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- ❖ Gambaran umum daerah (Aspek Administrasi, Geografi Dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, dan Dayat Saing
- ❖ Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah (IKU, IKK dan SPM)
- ❖ Permasalahan Pembangunan Daerah

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

- ❖ Kerangka Ekonomi Daerah (kondisi dan proyeksi ekonomi nasional Provinsi dan Daerah)
- ❖ Kerangka Keuangan Daerah (Realisasi APBD serta Proyeksi APBD Tahun 2024

Bab IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

- ❖ Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah (Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan)
- ❖ Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan)
- ❖ Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah (a. Sinergitas Prioritas Dan Program Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Dengan RPJMD, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat; b. Sinergitas Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; c. Sinergitas Target Kinerja Makro Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional, Sumatera Barat dan RPJMD, d. Sinergitas Kebijakan Kabupaten Solok Selatan Terhadap Isu Nasional Inovasi Daerah



Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

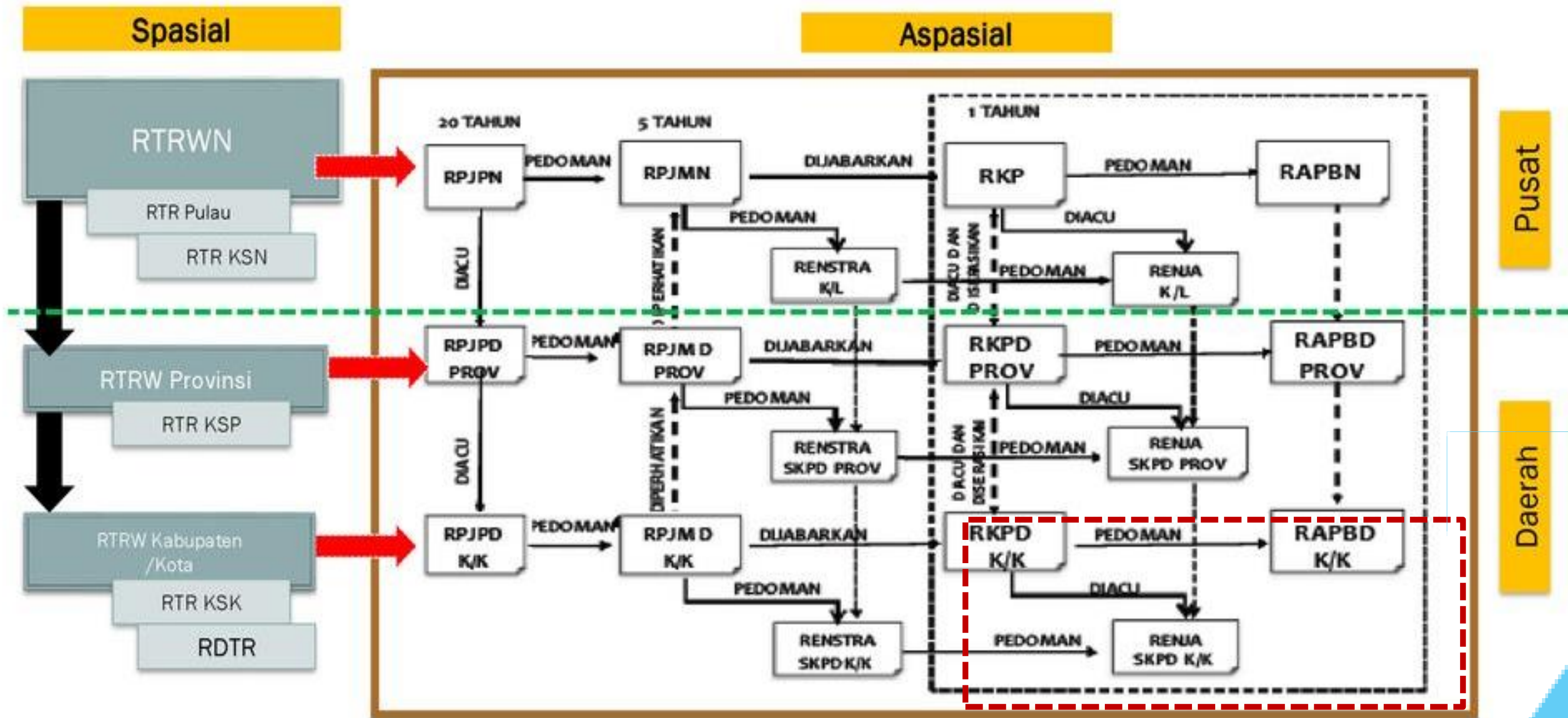
Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- ❖ Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)
- ❖ Indikator Kinerja Kunci Daerah (IKK),
- ❖ Indikator Kinerja SPM

Bab VII. Penutup

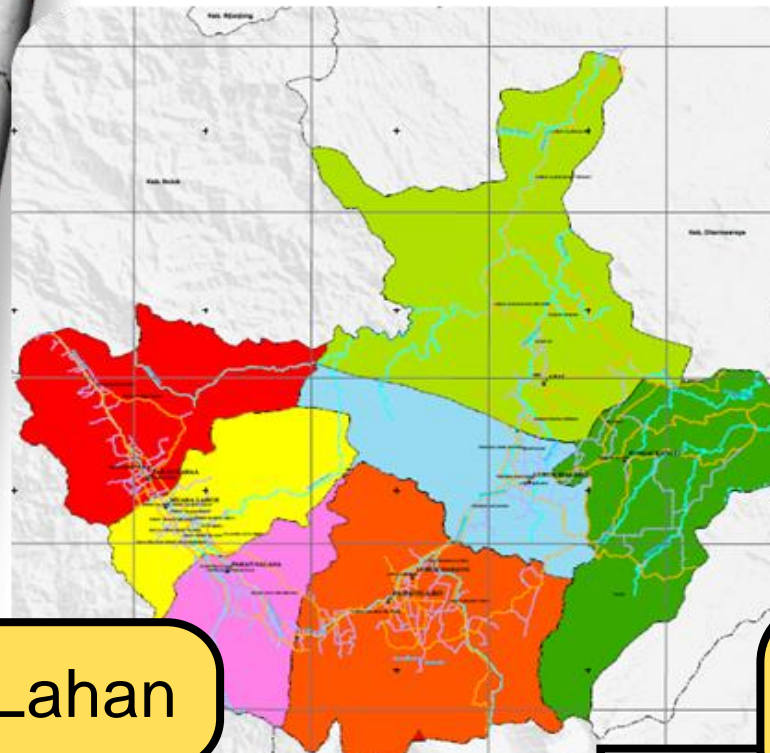
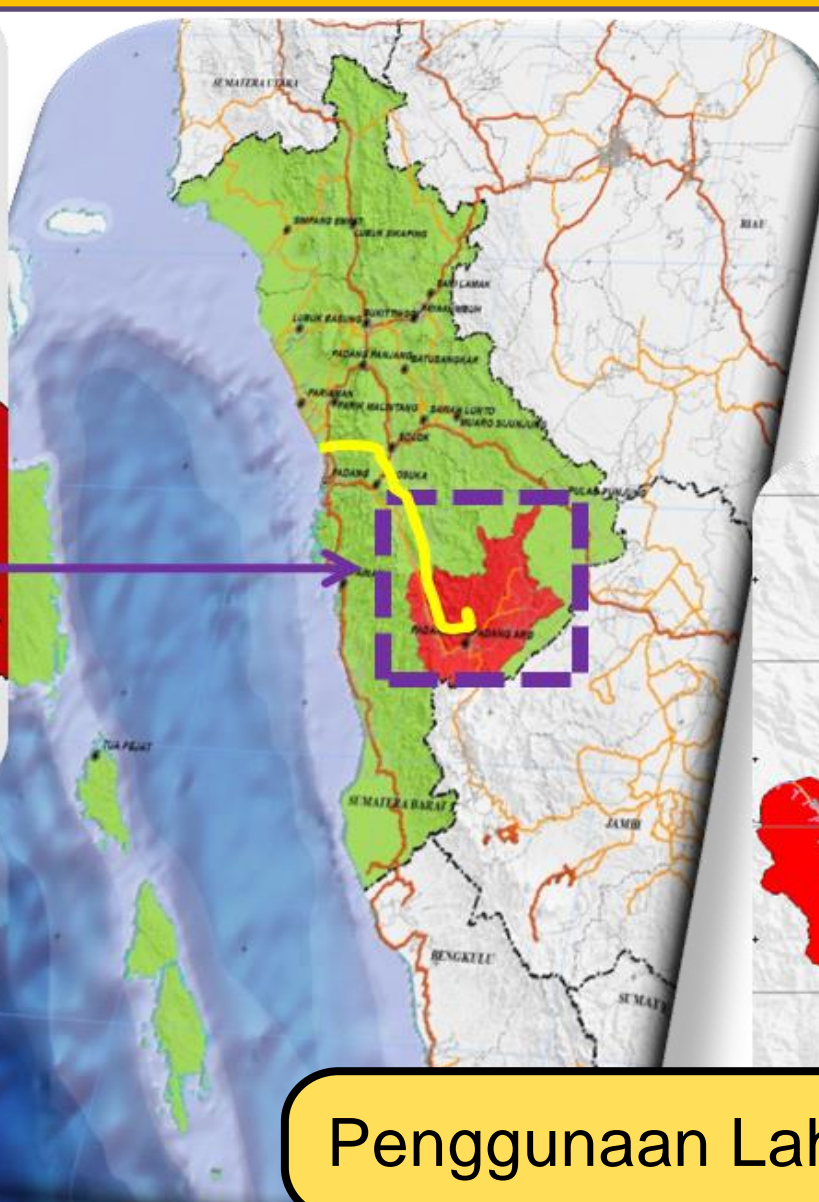
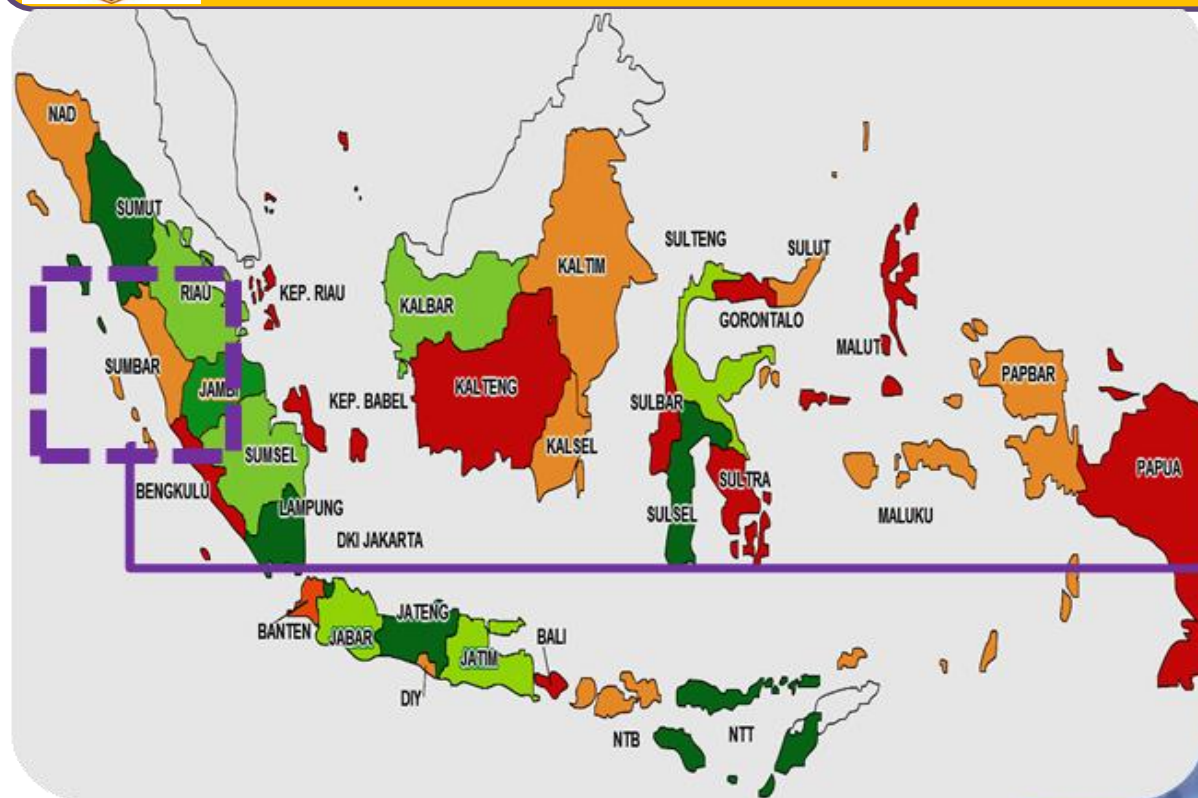
Lampiran: Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022

KETERKAITAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA





GAMBARAN UMUM WILAYAH



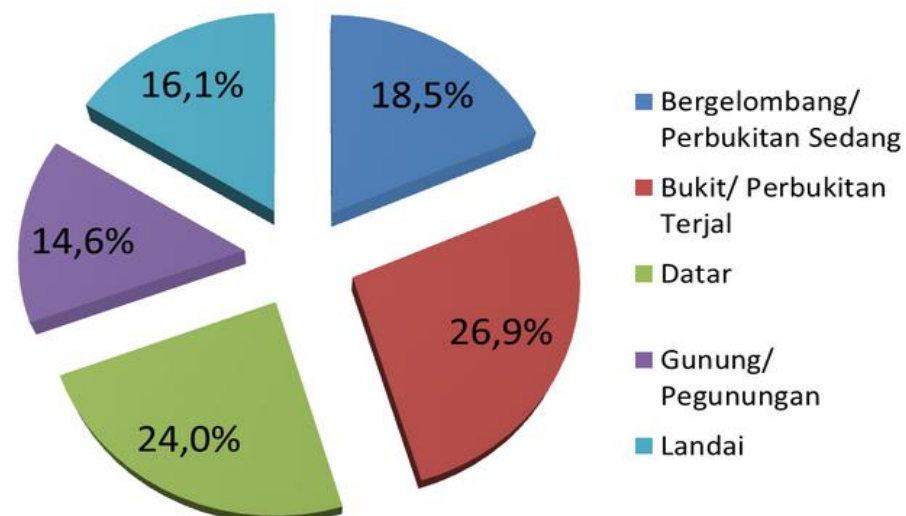
Posisi Wilayah

01° 17' 13" - 01° 46' 45"
Lintang Selatan
100° 53' 24" - 101° 26' 27"
Bujur Timur

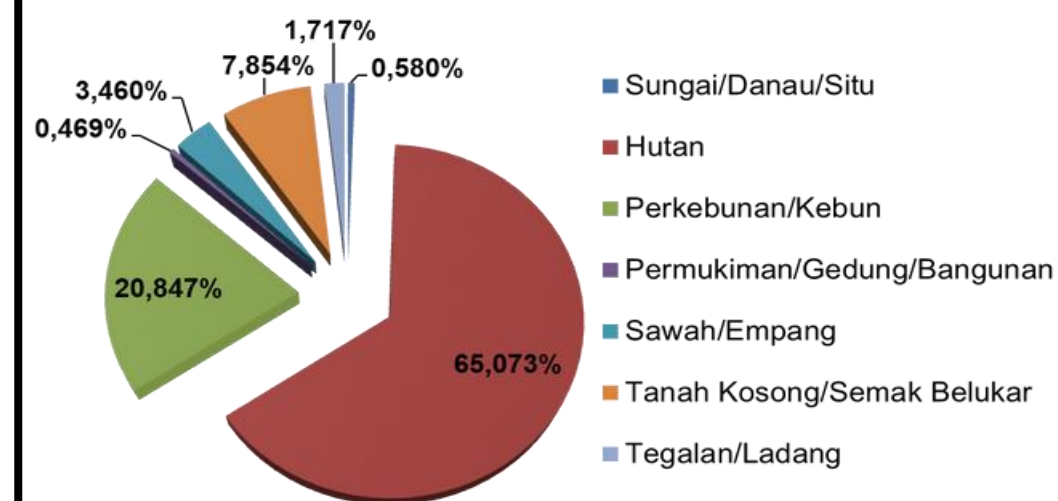
Luas Wilayah: 3.294,39 Km²

Ibu kota Kabupaten : Padang Aro
Jarak dari Ibu Kota Provinsi 168
Km

Topografi



Penggunaan Lahan



Wilayah Administrasi

- 7 Kecamatan
- 47 Nagari
- 275 Jorong

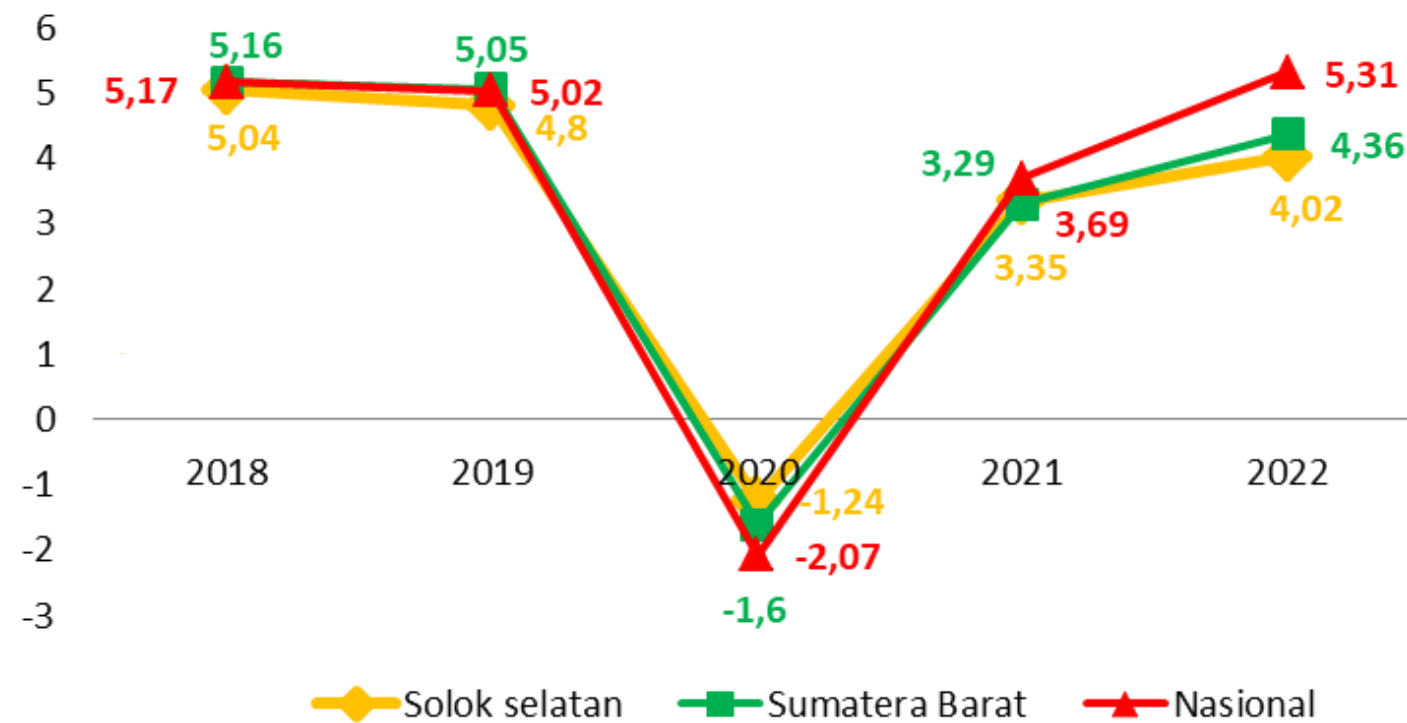


CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

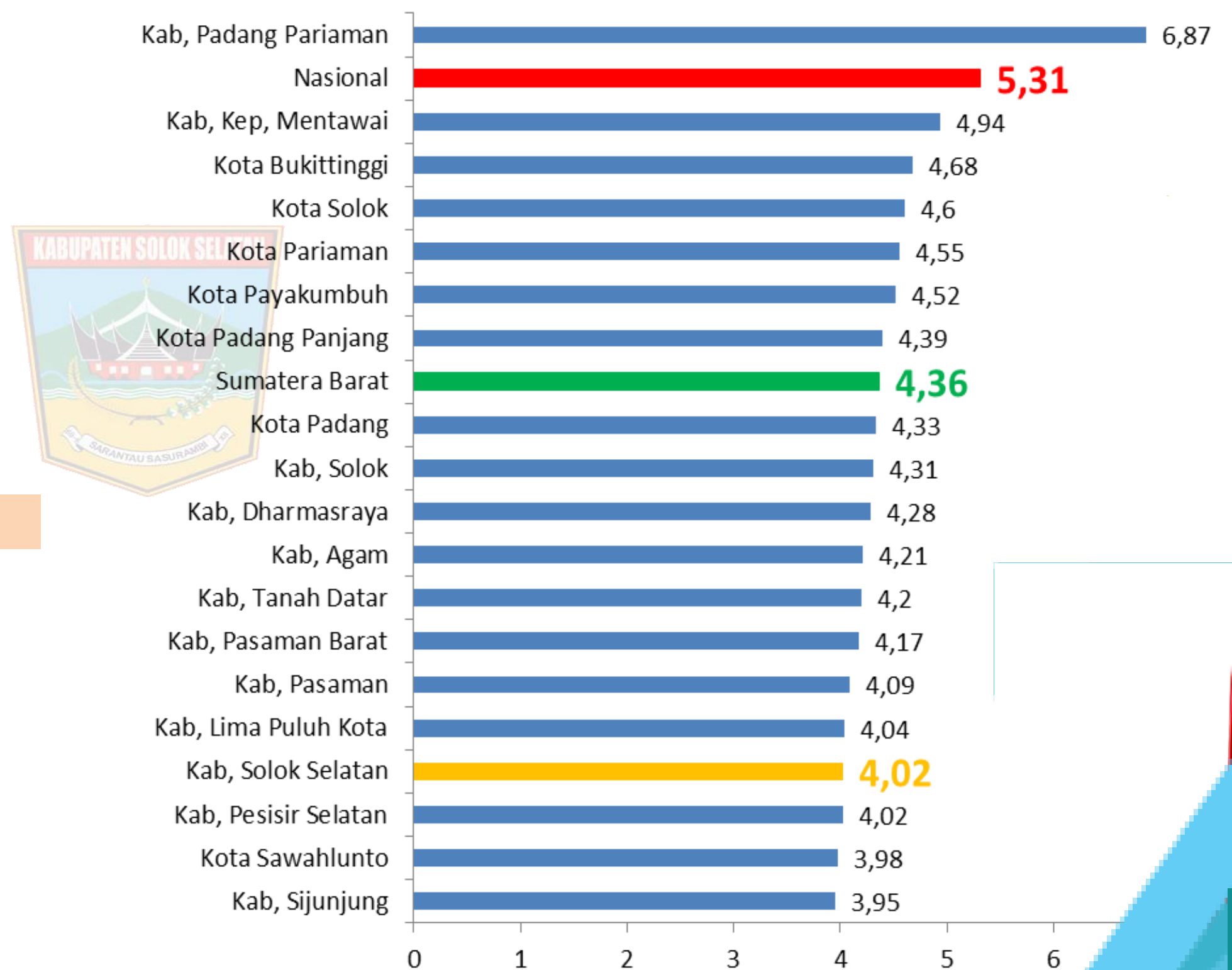


PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SOLOK SELATAN

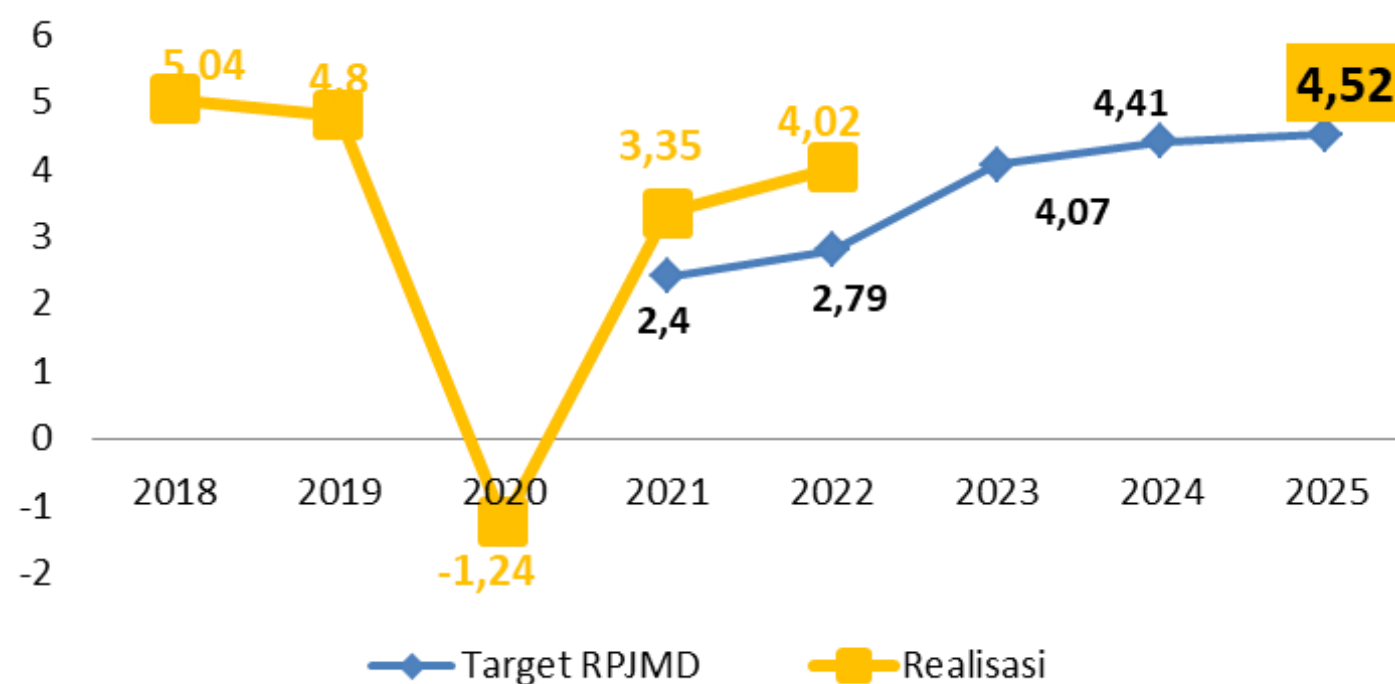
Perbandingan Realisasi dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Perbandingan dengan Kab/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

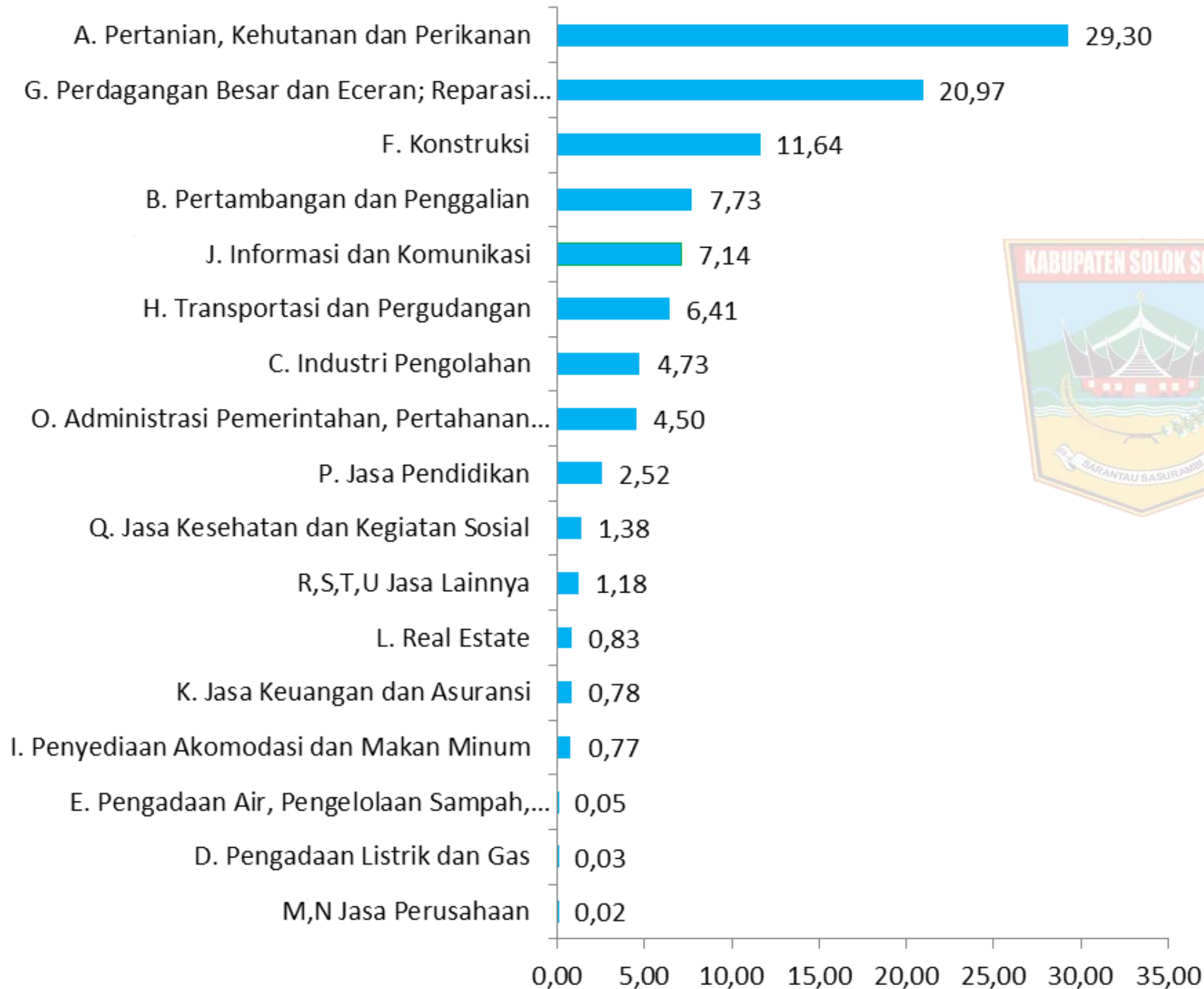


Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi

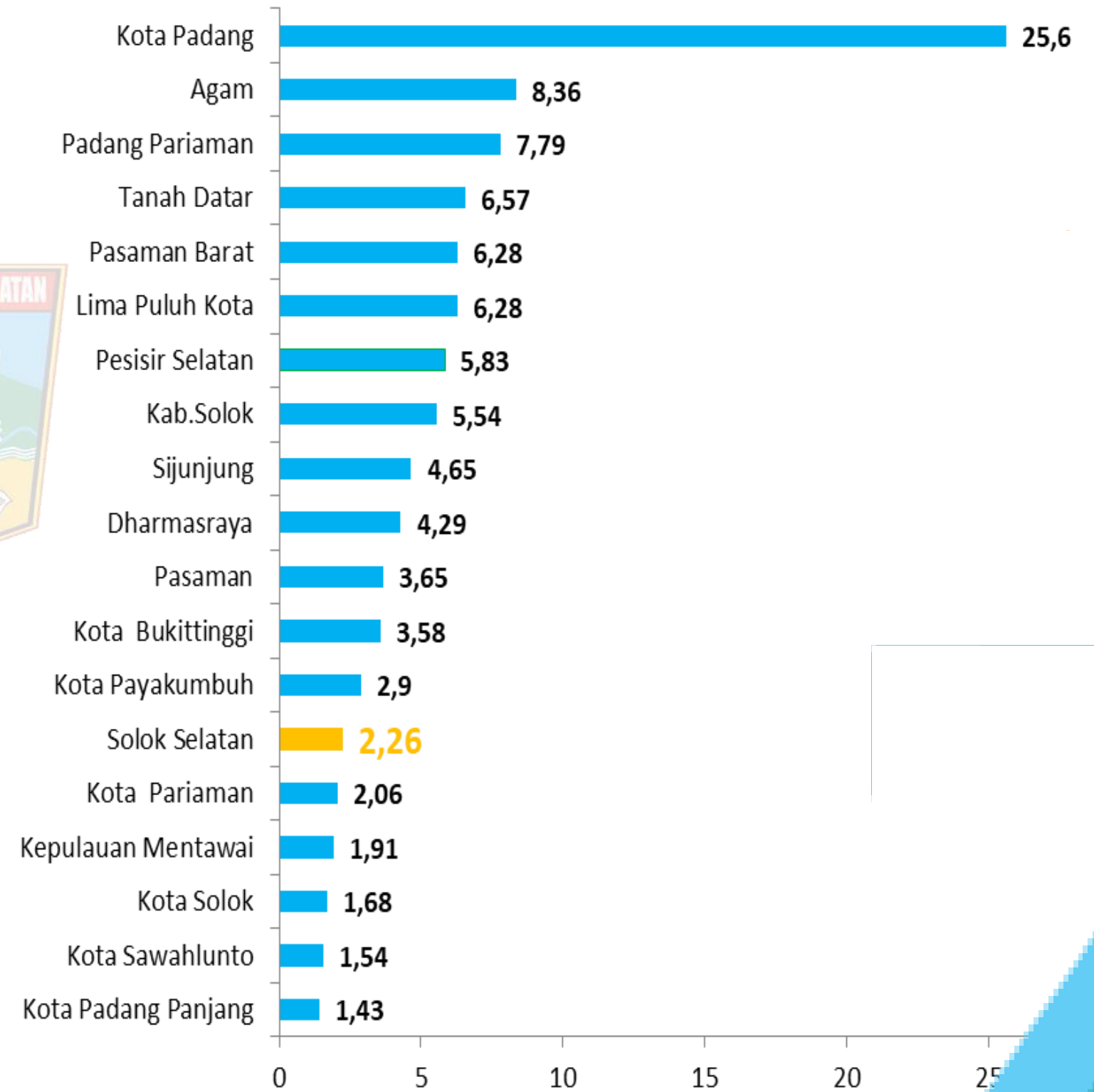


KONTRIBUSI PDRB KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kontribusi PDRB Kabupaten Solok Selatan Perlapangan Usaha

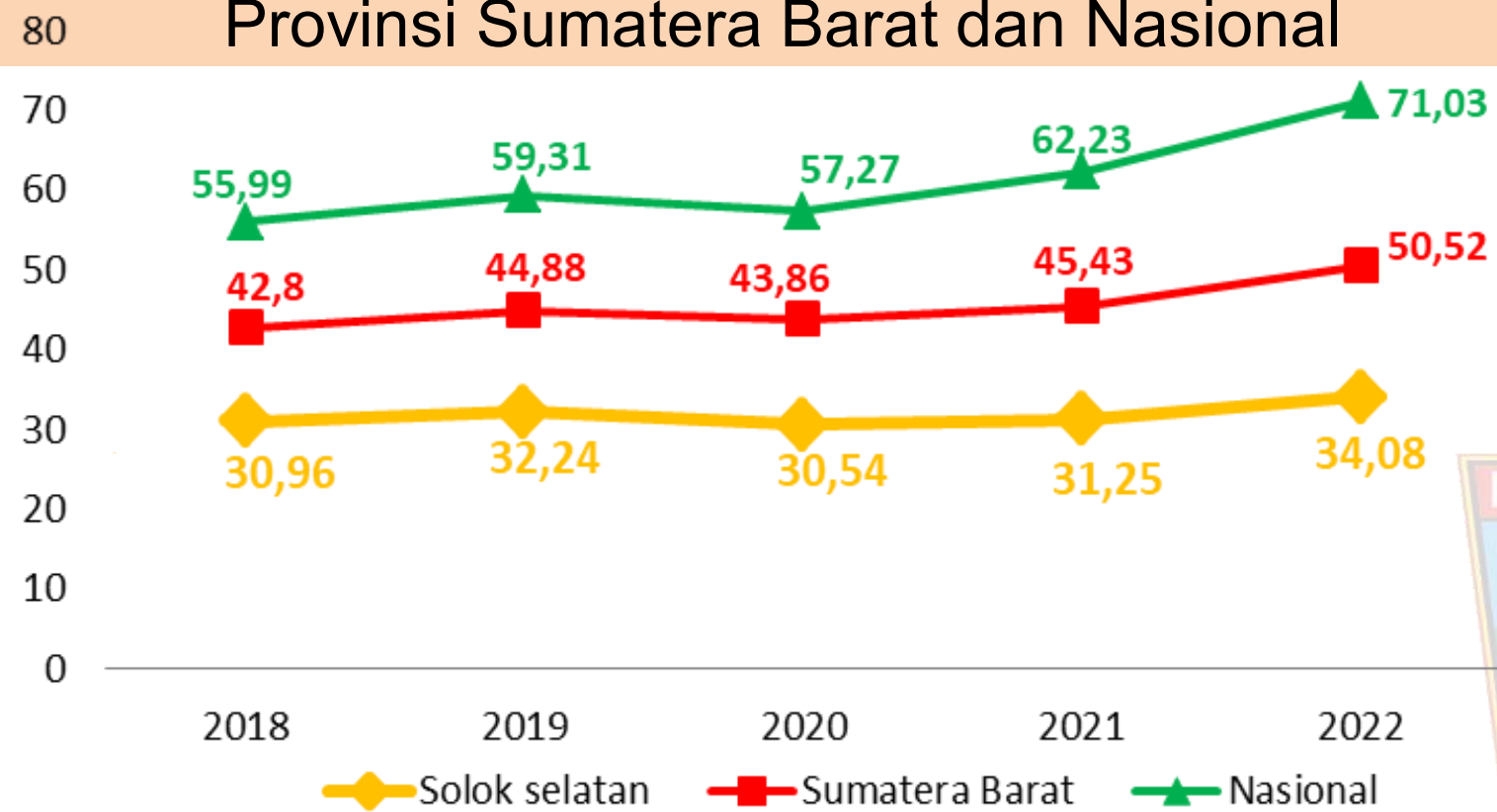


Kontribusi PDRB Per Kabupaten Kota terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat

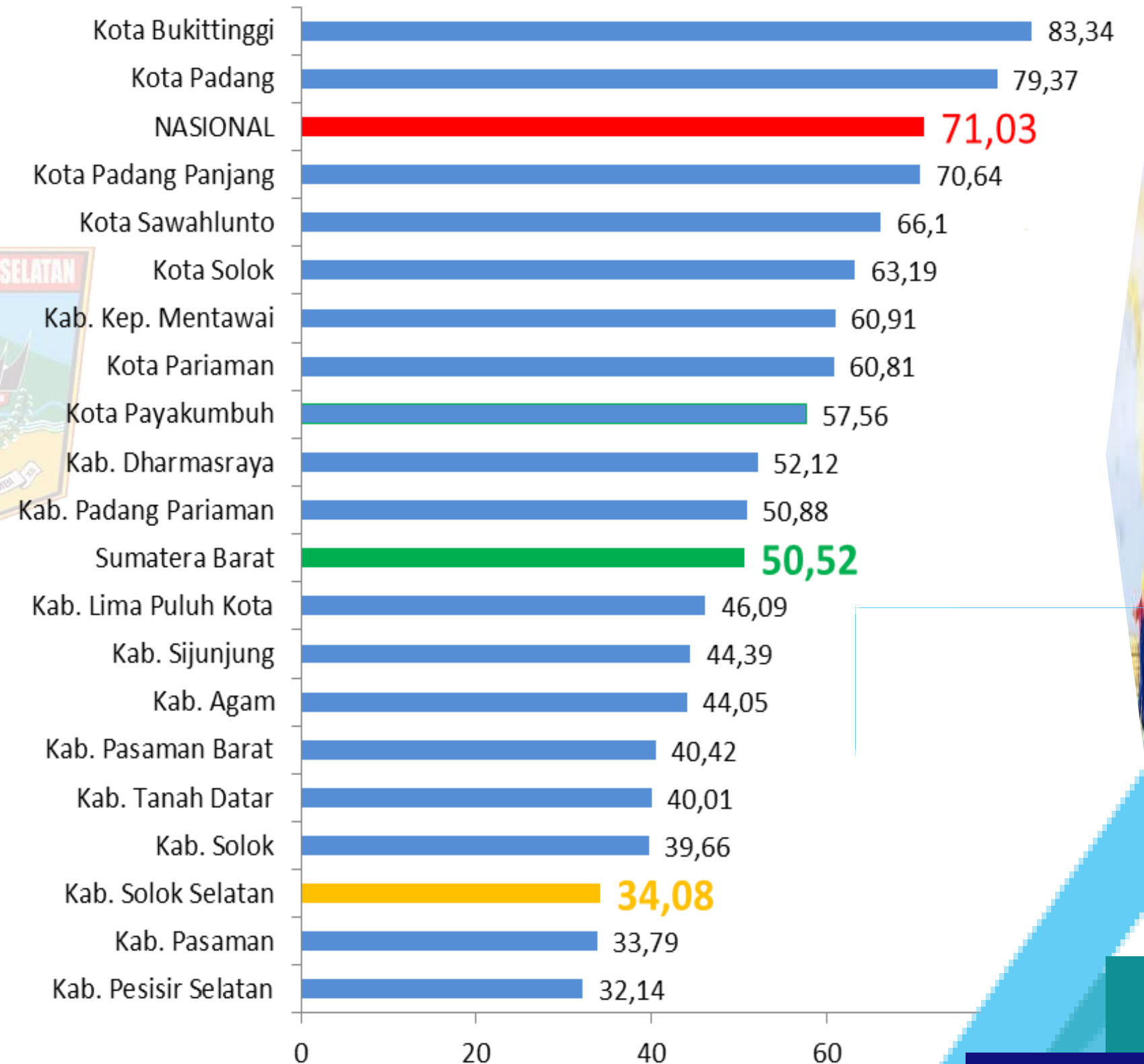


PDRB PERKAPITA ADHB KABUPATEN SOLOK SELATAN (Rp. Juta)

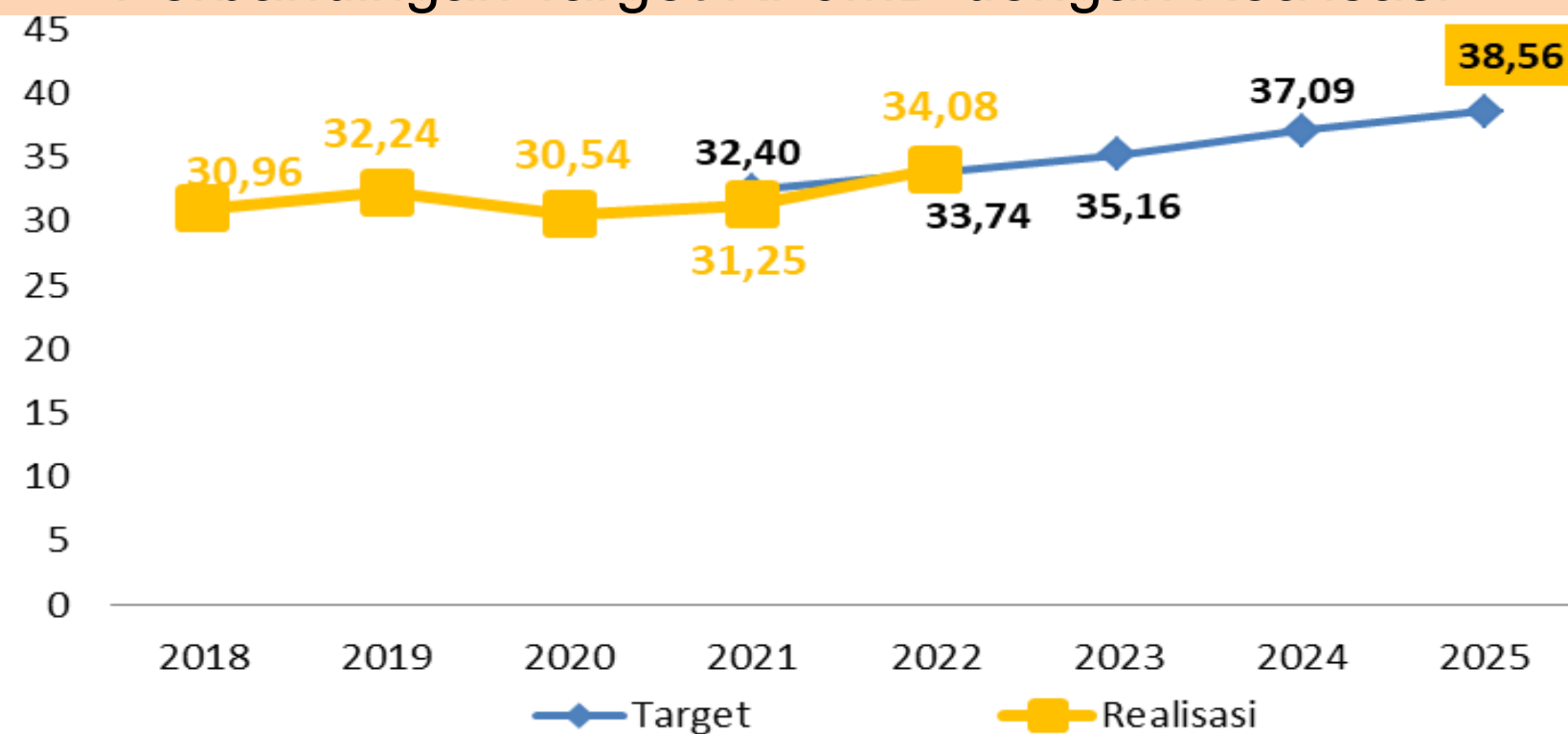
Perbandingan Realisasi dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Perbandingan dengan Kab/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

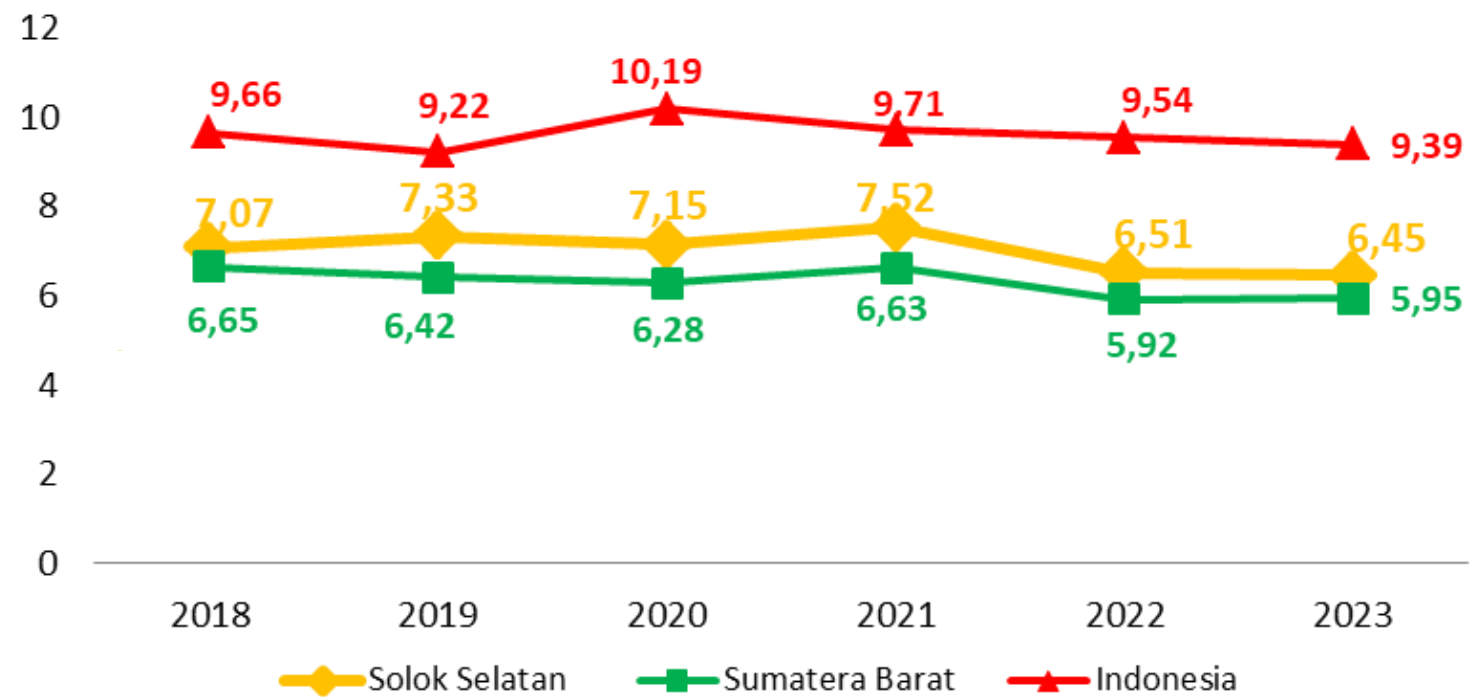


Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi

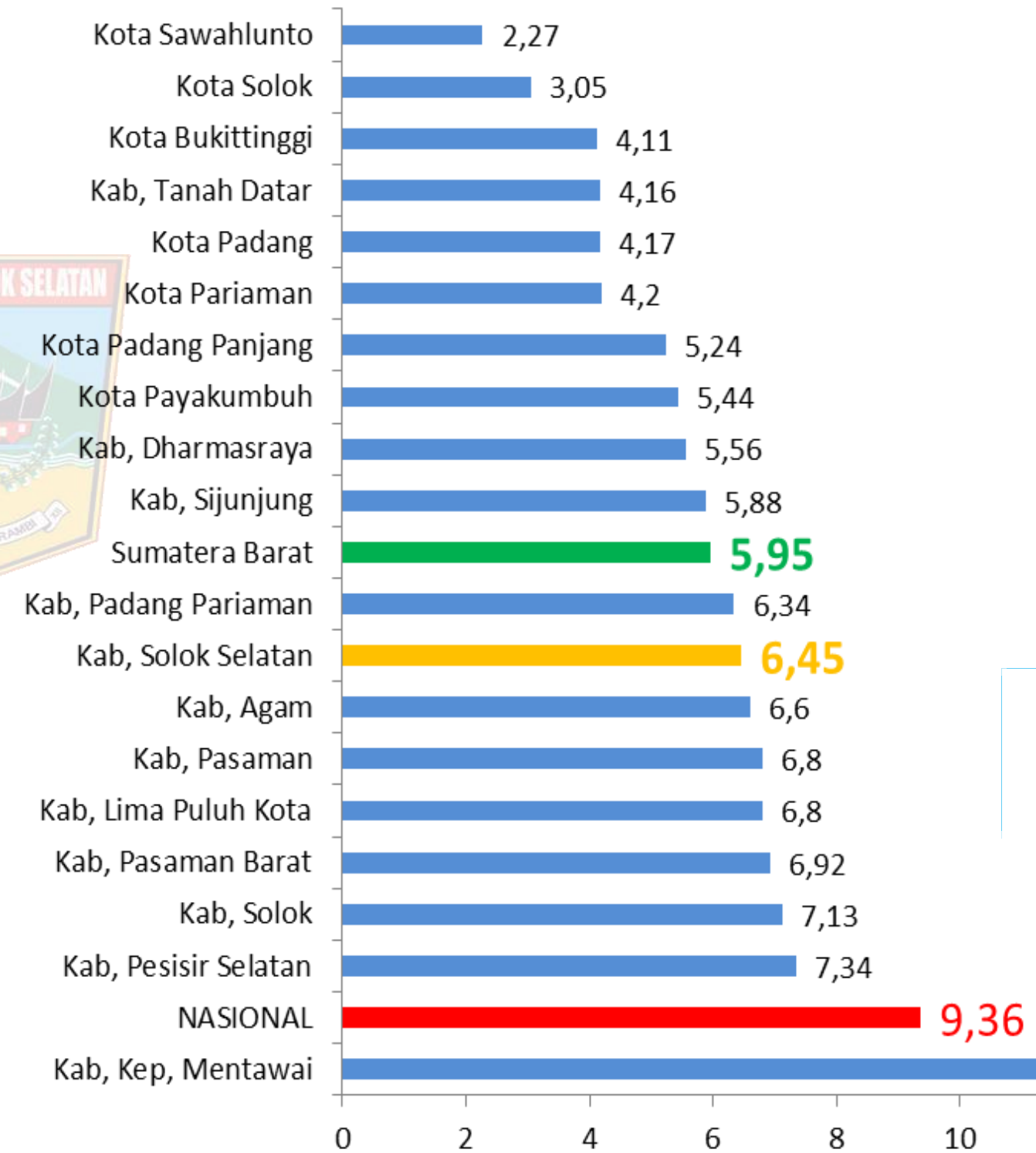


TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

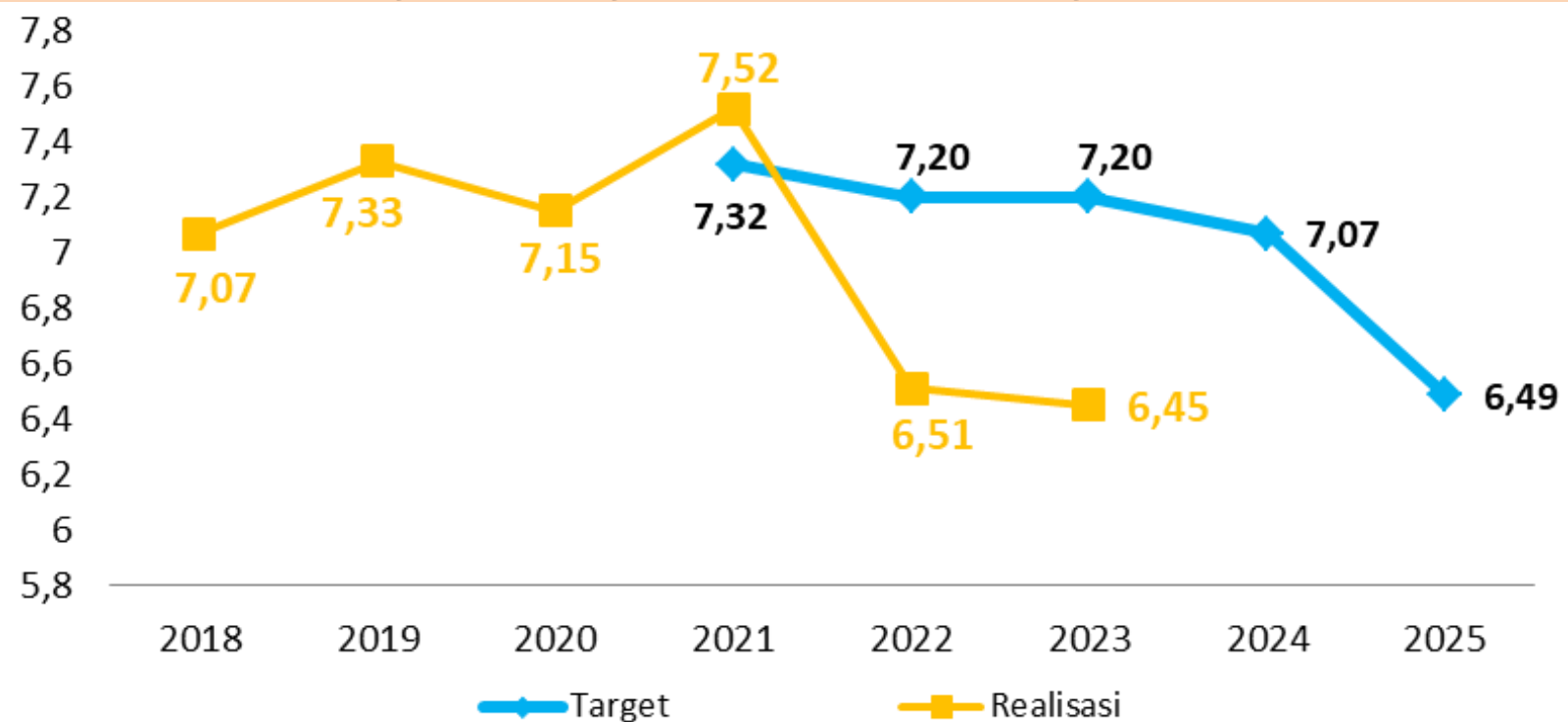
Perbandingan Realisasi dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Perbandingan dengan Kab/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

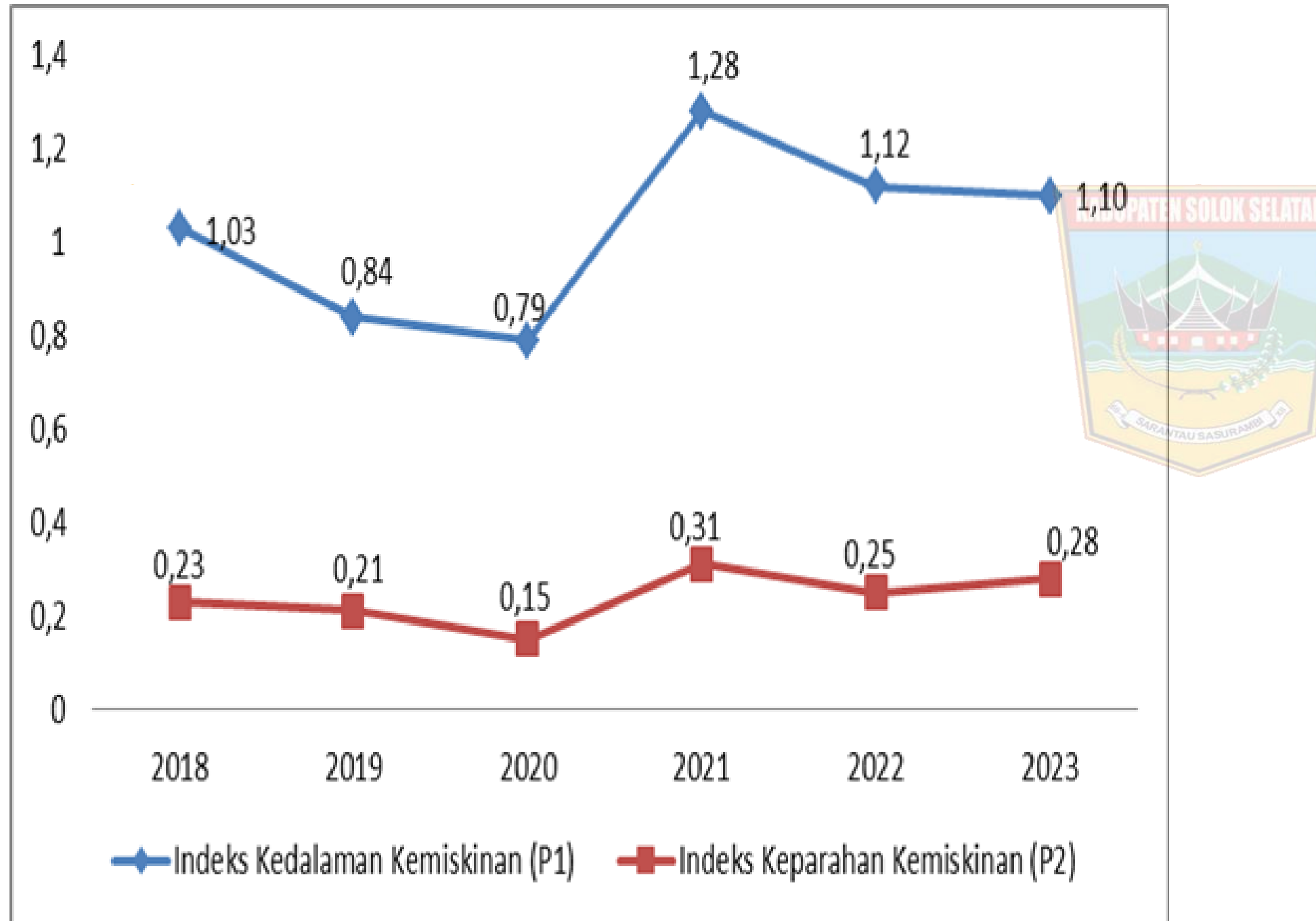


Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi



TINGKAT KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indek
Keparahan Kemiskinan (P2)

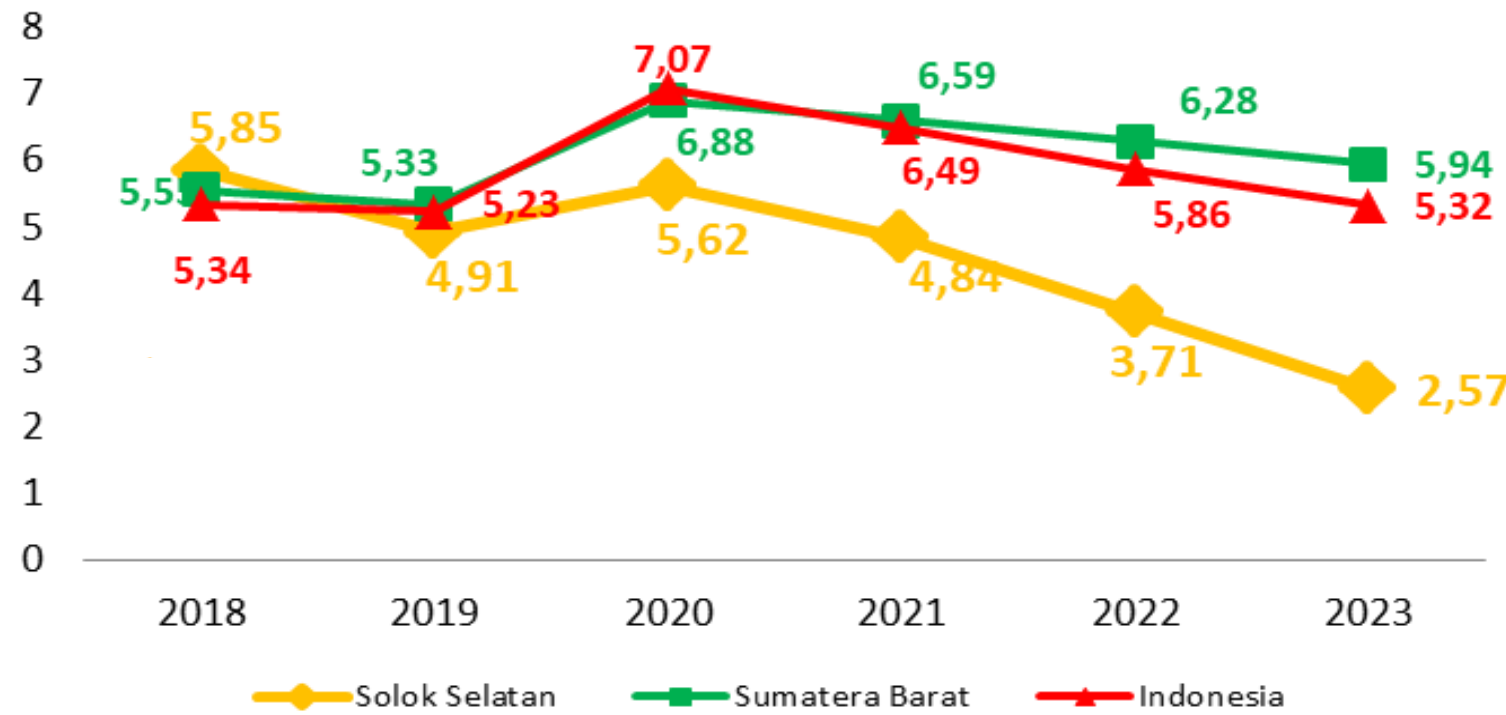


Perkembangan Garis Kemiskinan

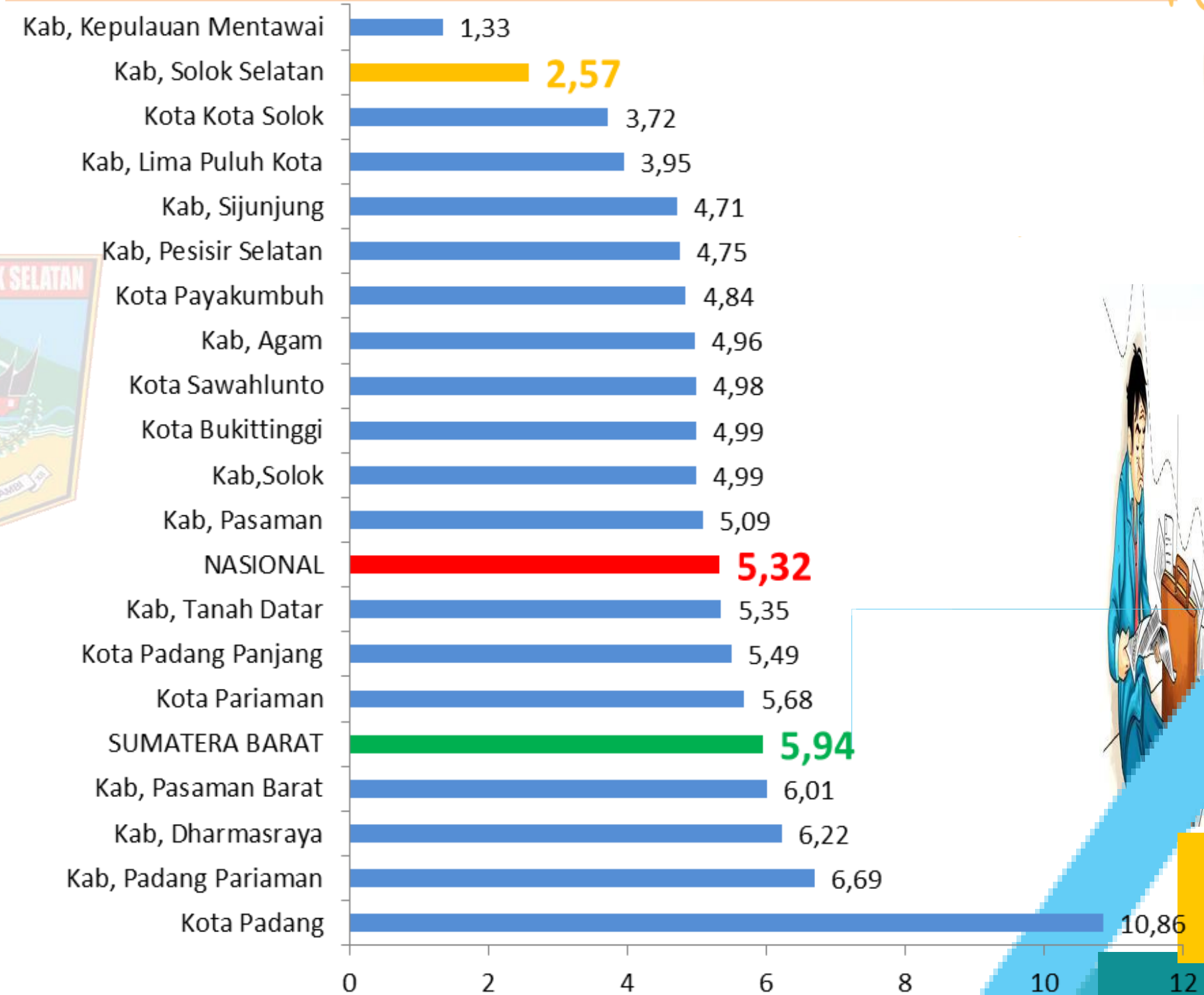
NO	Kabupaten Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		
		2021	2022	2023
1	Kab. Kepulauan Mentawai	356.403	386.152	421.113
2	Kab. Pesisir Selatan	491.573	526.564	554.057
3	Kab. Kab.Solok	461.030	484.358	532.900
4	Kab. Sijunjung	455.346	484.572	529.460
5	Kab. Tanah Datar	441.793	466.907	515.587
6	Kab. Padang Pariaman	475.342	499.461	548.147
7	Kab. Agam	444.711	485.222	530.290
8	Kab. Lima Puluh Kota	475.123	504.670	553.068
9	Kab. Pasaman	408.293	431.915	472.703
10	Kab. Solok Selatan	438.187	470.090	516.004
11	Kab. Dharmasraya	503.183	530.693	581.058
12	Kab. Pasaman Barat	492.467	544.829	596.225
13	Kota Padang	602.540	634.581	698.720
14	Kota Solok	464.977	491.488	538.682
15	Kota Sawahlunto	412.757	443.301	487.610
16	Kota Padang Panjang	516.648	543.609	599.681
17	Kota Bukittinggi	540.457	570.032	619.896
18	Kota Payakumbuh	543.335	573.234	616.357
19	Kota Pariaman	495.386	522.932	576.455
	SUMATERA BARAT	568.703	610.941	667.925

TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

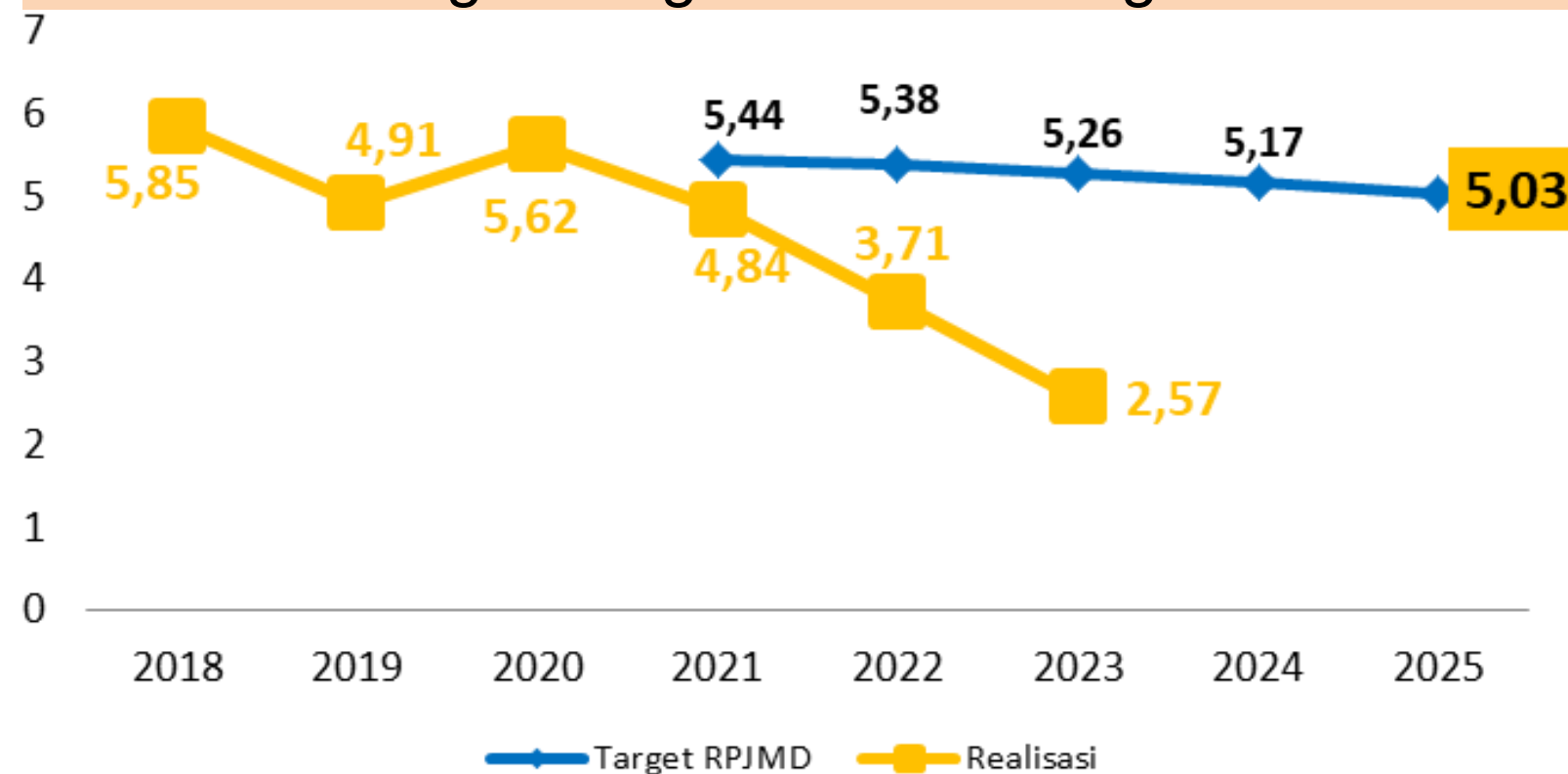
Perbandingan Realisasi dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Perbandingan dengan Kab/Kota, Provinsi Sumatera Barat
dan Nasional

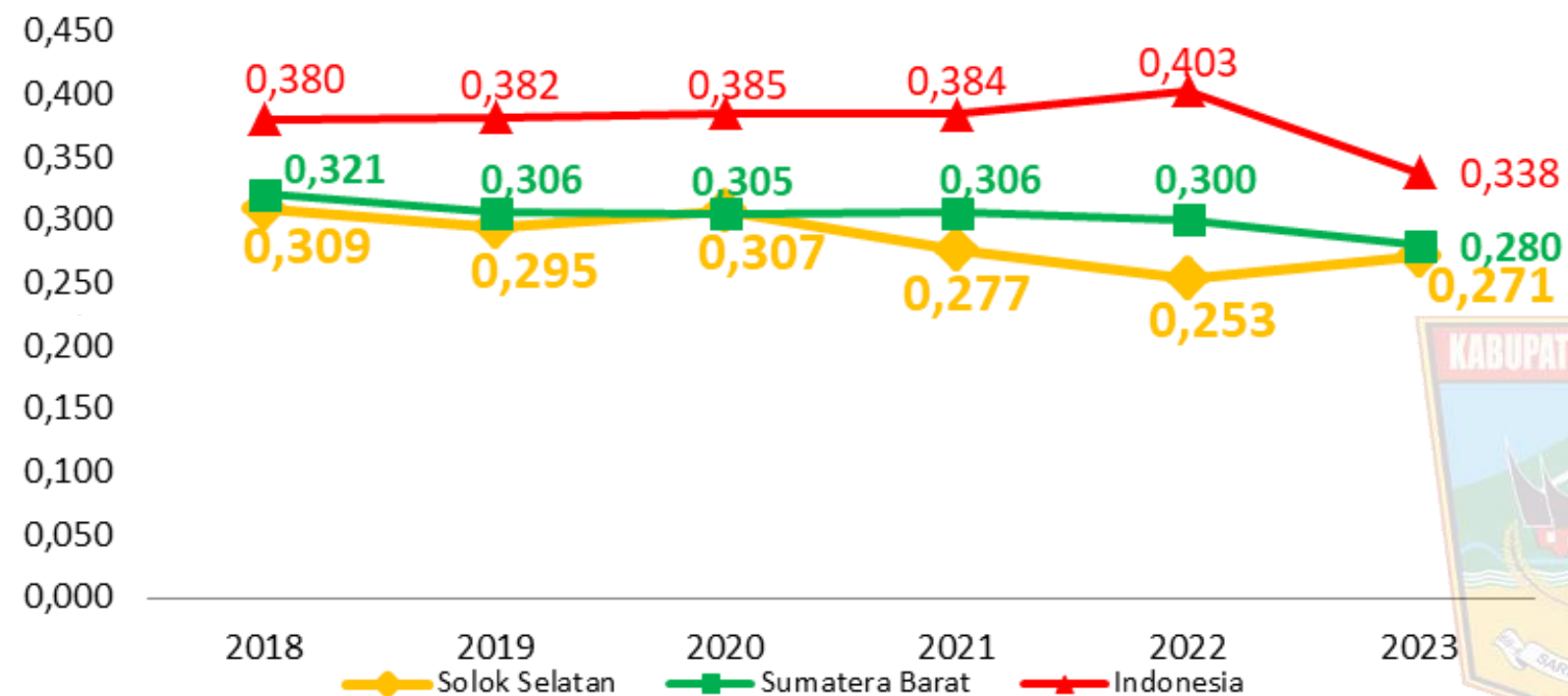


Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi

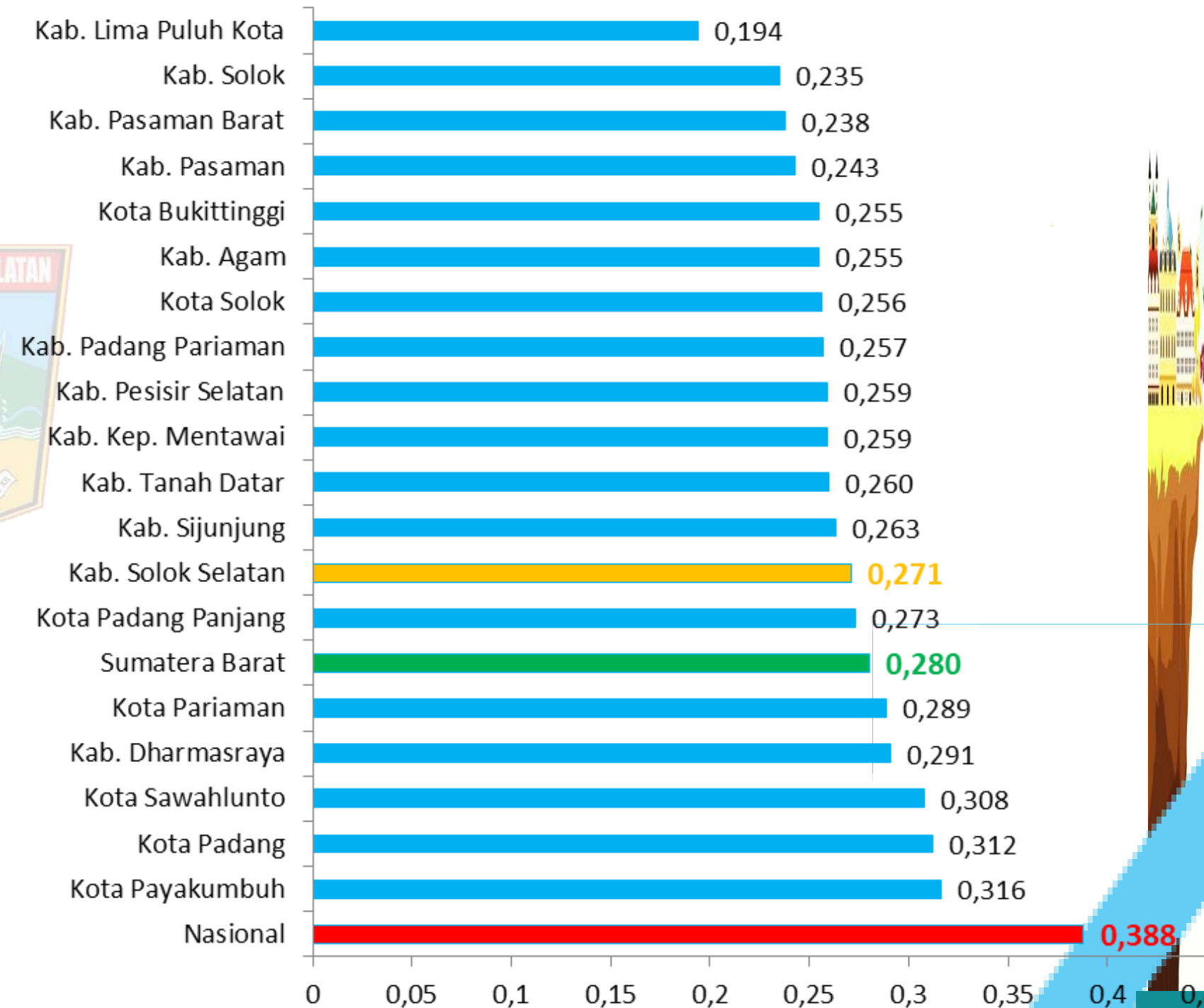


KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

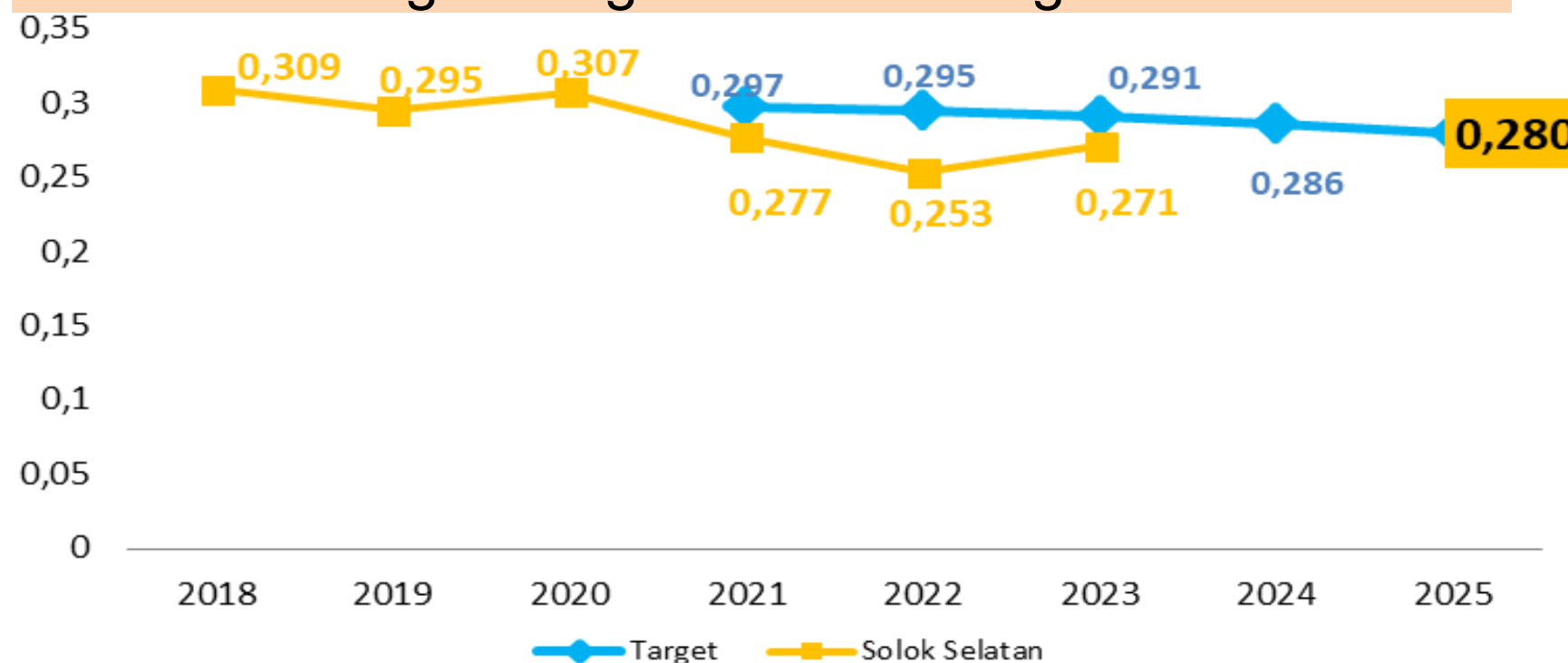
Perbandingan Realisasi dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Perbandingan dengan Kab/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

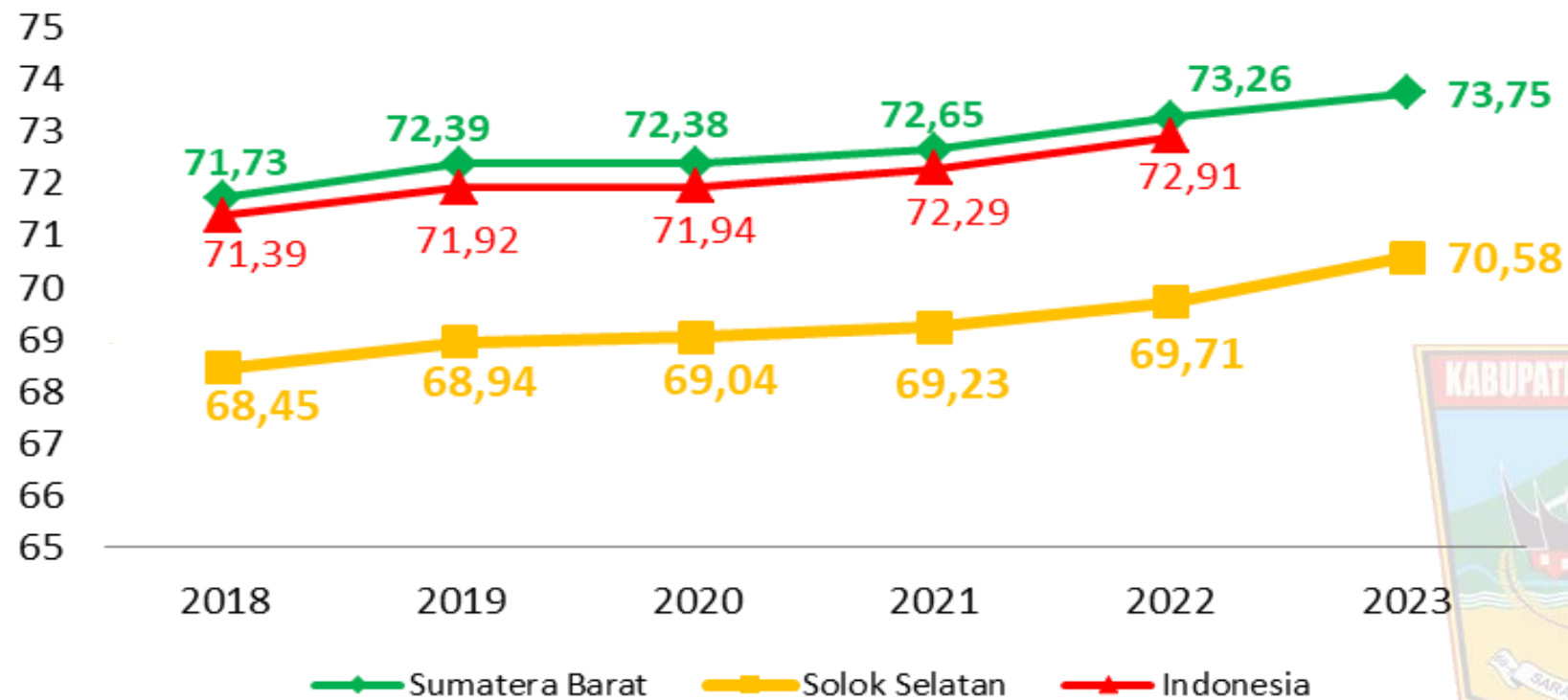


Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi

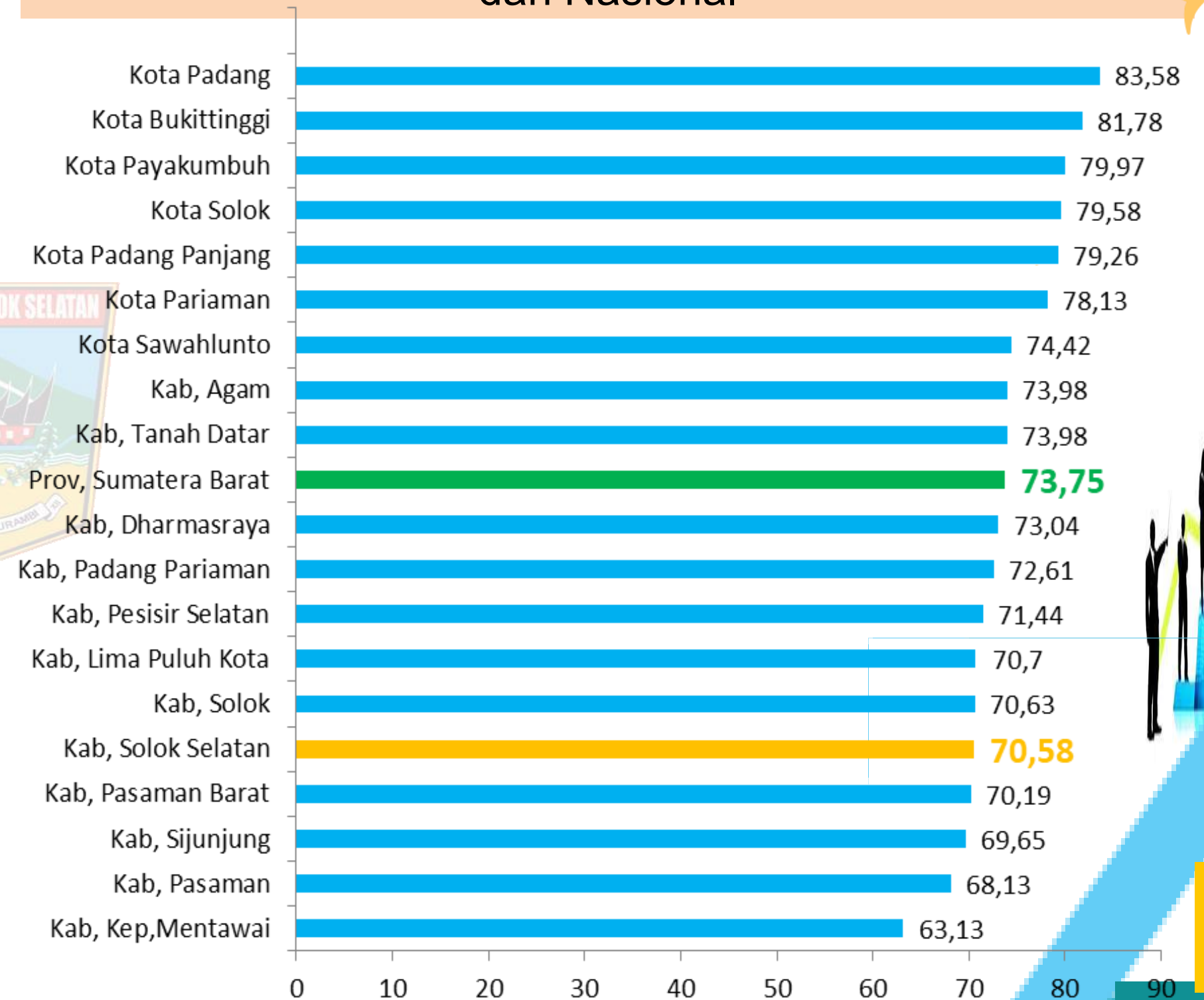


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SOLOK SELATAN

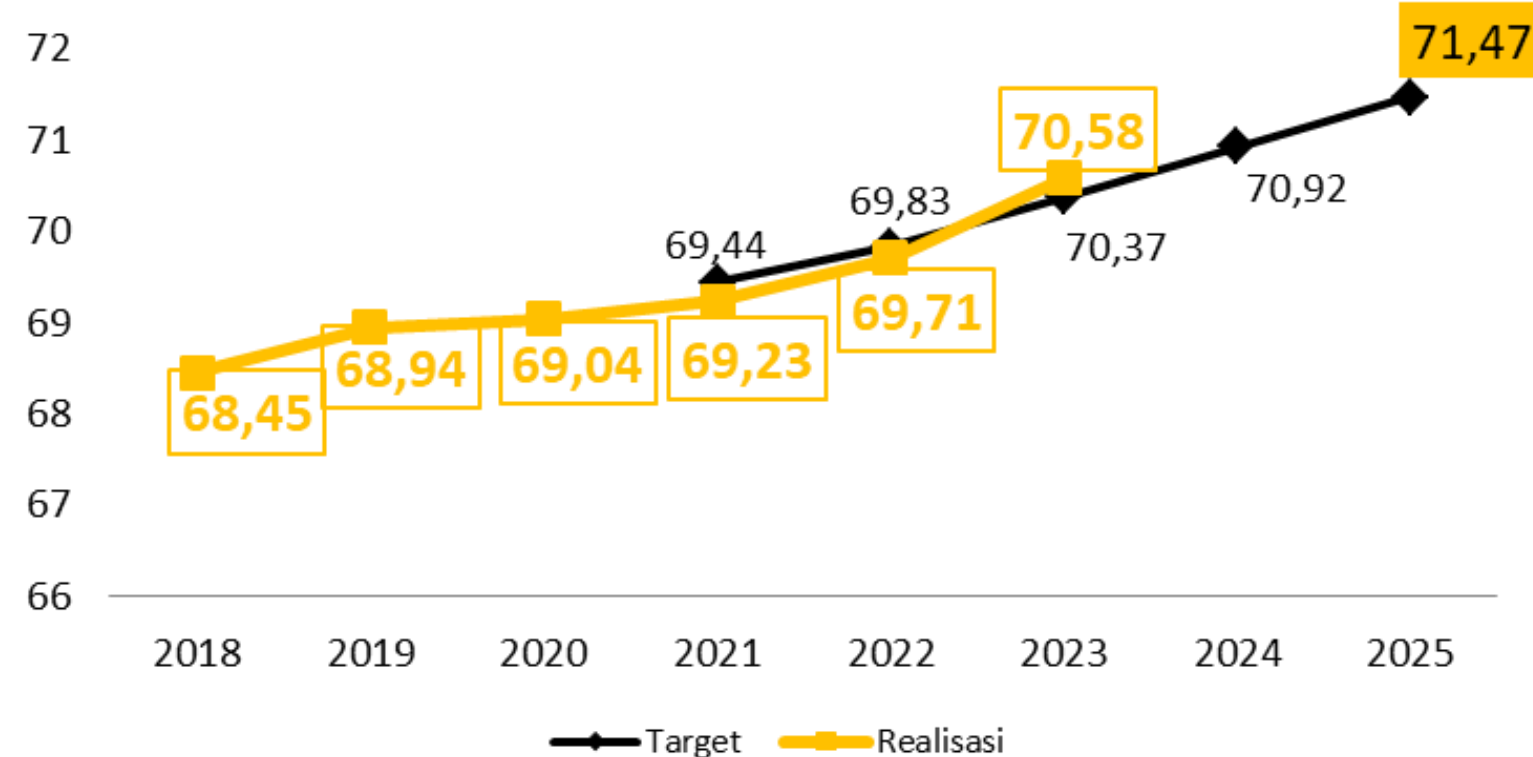
Perbandingan Realisasi dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Perbandingan dengan Kab/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

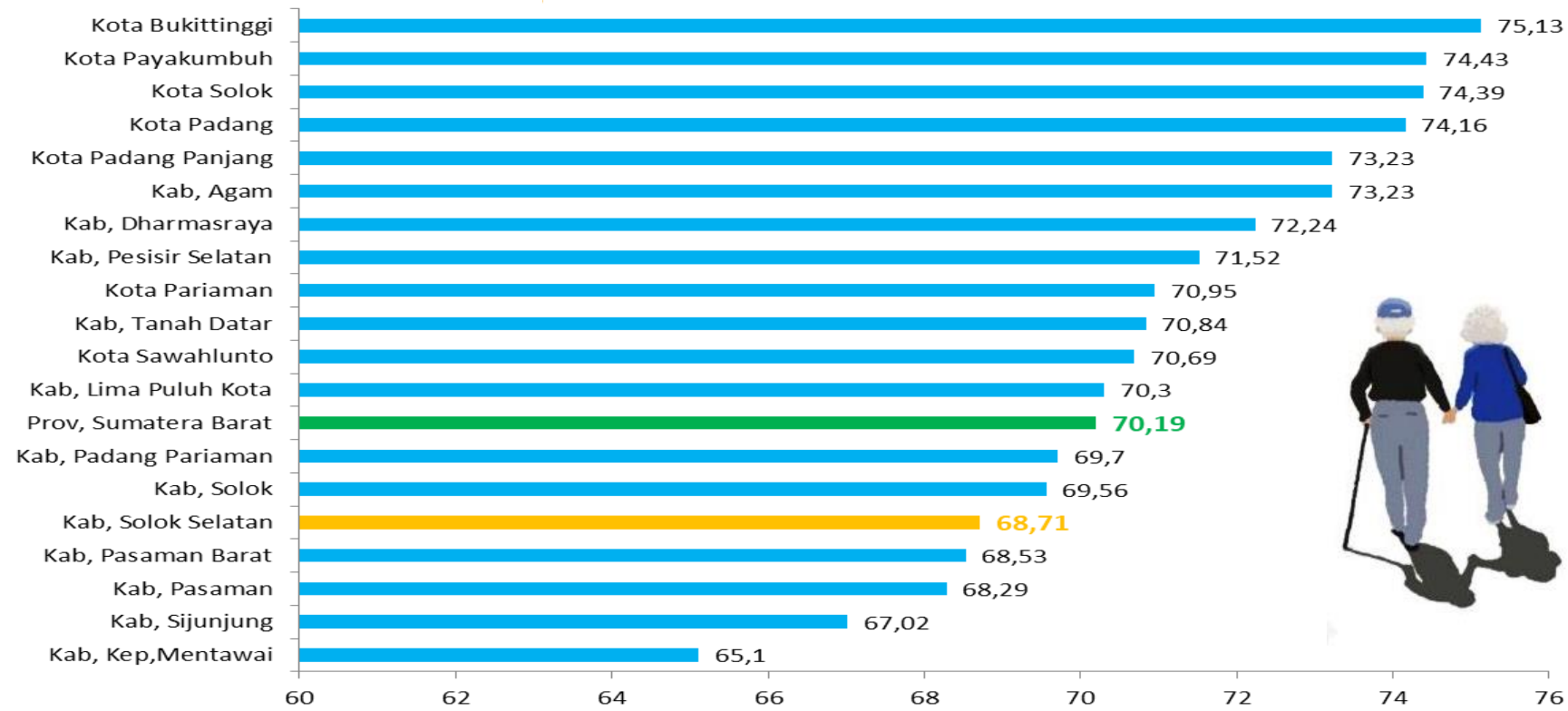


Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi

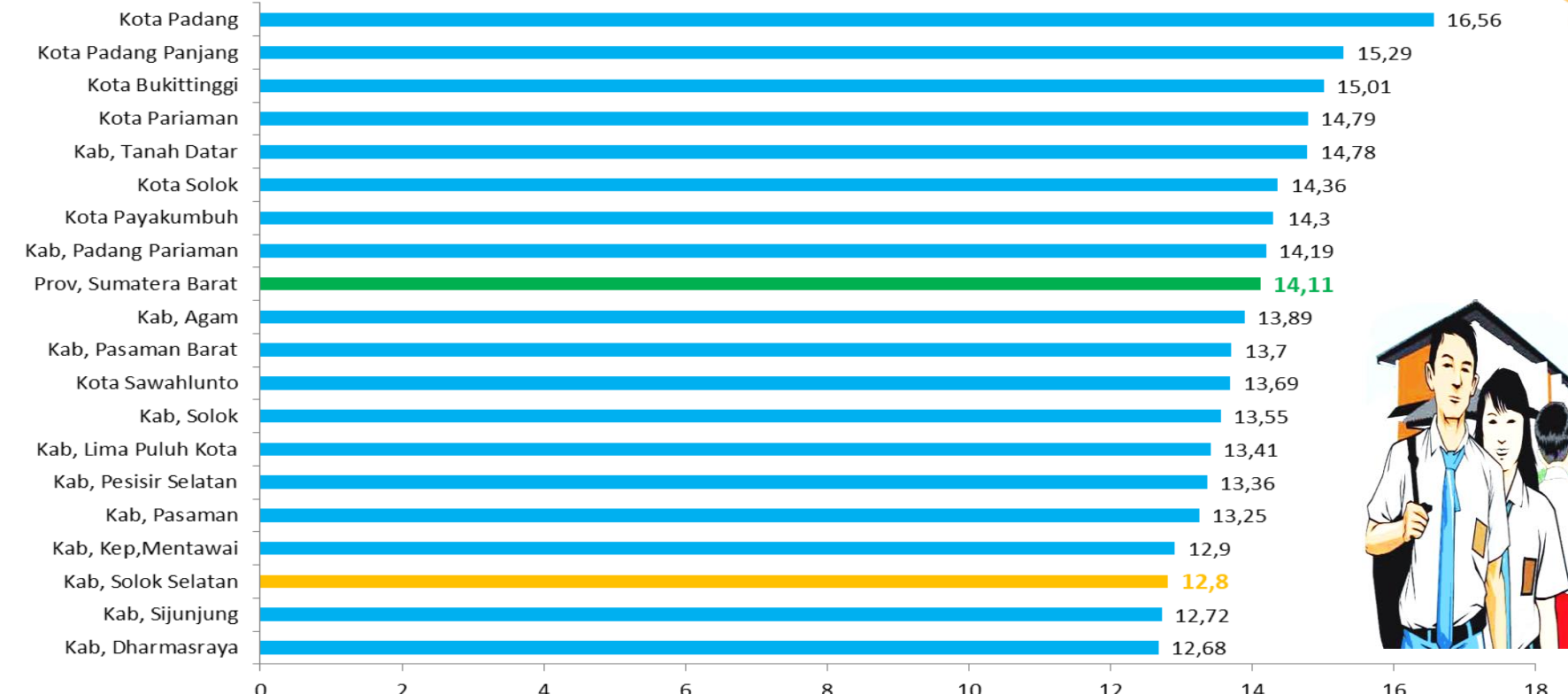


INDIKATOR PEMBENTUK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SOLOK SELATAN

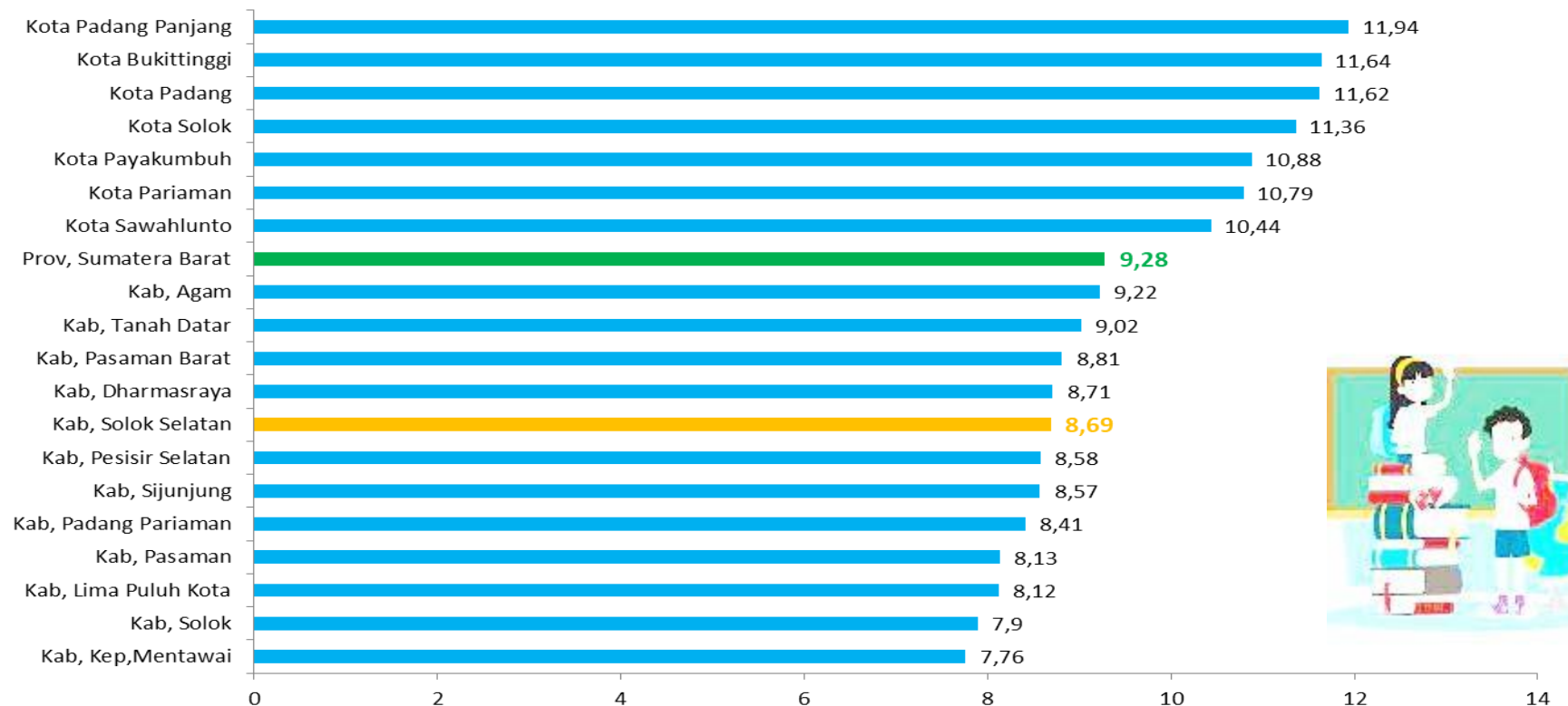
Umur Harapan Hidup (Tahun)



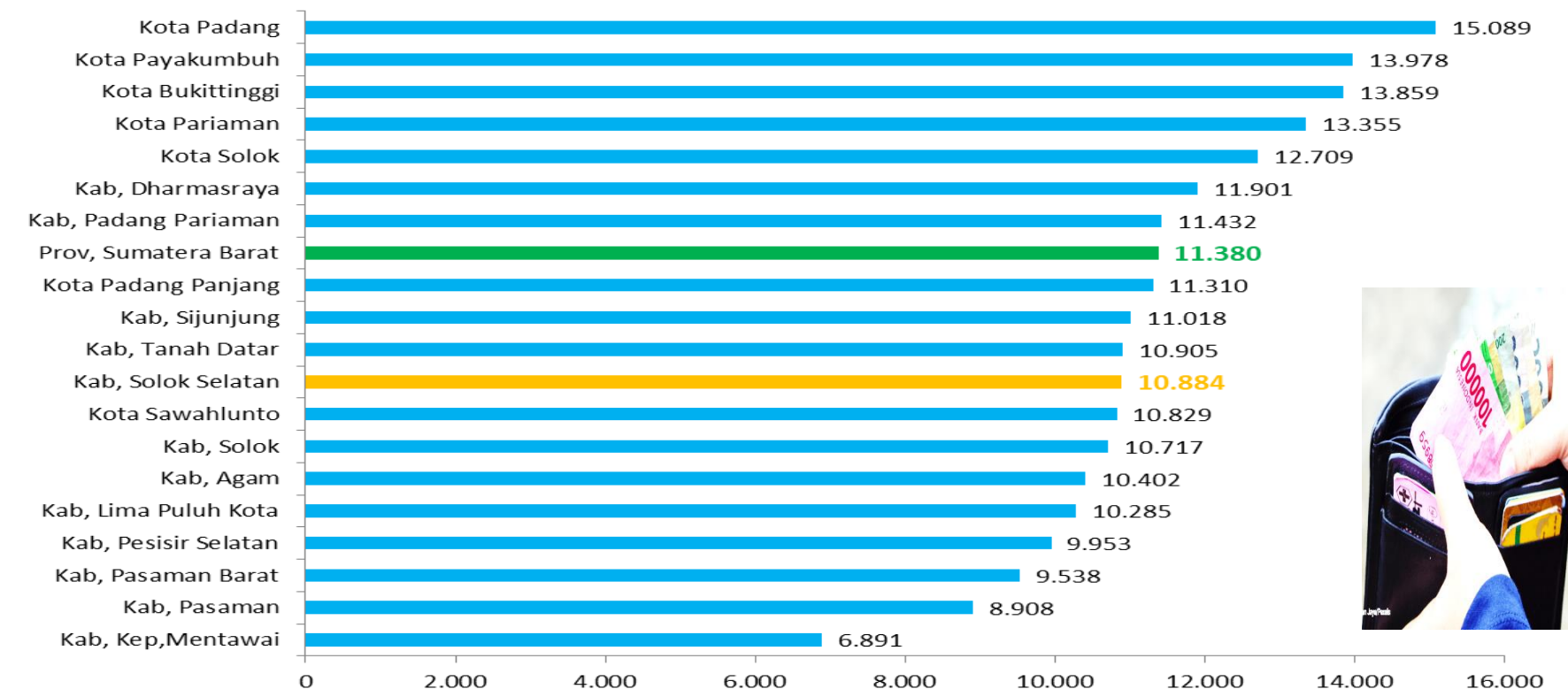
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)



Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)



Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (Rp.Ribu /Tahu)



CAPAIAN KINERJA TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS

No	Indikator	2022	2023
1.	Indek Reformasi Birokrasi	48,21 (C)	62,42 (B)
2.	Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP
3.	Nilai SAKIP	57,05 (CC)	60,58 (B)
4.	Indeks SPBE	2,26 (Cukup)	2,98 (Baik)
5.	Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	78,34% % (Kualitas tinggi)	84,95% (Kualitas tinggi)
6.	Nilai Indek Pengelolaan Keuangan	68,60	80,12
7.	Nilai Indek Keterbukaan Informasi Publik	83,21 (Menuju informatif)	81,18 (Menuju informatif)
8.	Nilai Indek Inovasi Daerah	53,14 (Inovatif)	53,02 (Inovatif)
9.	Nilai Rata-Rata Indek Kepuasan Masyarakat	87,08/Baik Berdasarkan penilaian mandiri (Google Form)	77,08/Baik Bekerja sama dengan Lembaga Kajian Islam Politik dan Sosial (KIPS) Sumatera Barat

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Untuk Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Jenis-Jenis SPM



Sumber: PP No. 2 tahun 2018
Produksi: 16-03-2018
IndonesiaBaik.id

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Total Pencapaian target kinerja 26 Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal tahun 2022 adalah 65 point rata-rata pencapaian 2,5 (kategori sedang)

No	Pencapaian	Kategori	Skor
1	Lebih/Sama dari 100%	Sangat Tinggi	4
2	90% s.d kurang dari 100%	Tinggi	3
3	75% s.d kurang dari 90%	Sedang	2
4	Kurang dari 75 %	Rendah	1

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Total pencapaian kinerja 12 indikator Tujuan Daerah adalah 36 point dengan rata-rata pencapaian kinerja rata-rata 3,00 atau termasuk kategori pencapaian target kinerja Tinggi.
- Total pencapaian kinerja 25 indikator Sasaran Daerah (IKU) adalah 84 dengan rata-rata pencapaian adalah 3,36 atau termasuk kategori pencapaian target kinerja Tinggi.

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Total pencapaian target kinerja 215 Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 adalah 609 point dengan rata-rata pencapaian 2,83 (kategori sedang)



TEMA PRIORITAS DAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025





VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021-2026

• Visi

Mewujudkan Solok Selatan yang Maju dan Sejahtera

• Misi



- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif
- Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani
- Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
- Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 DAN 2025

Tujuan dan Sasaran pembangunan dari penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Tujuan dengan dan 14 (empat belas) Sasaran

Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif
Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja
Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah
Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani
Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani
Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Kawasan Pertumbuhan
Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan 1 : Meningkatnya aktualisasi nilai seni, budaya, olahraga dan kearifan lokal dalam interaksi kehidupan masyarakat
Sasaran 1 : Meningkatnya peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat
Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Berolahraga masyarakat
Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan terhadap PPKS
Tujuan 3 : Meningkatnya peran Nagari, masyarakat dan Swasta dalam pembangunan
Sasaran 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan nagari dan daerah
Sasaran 2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran 3. Peningkatan Partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

Kebijakan Yang Mempengaruhi Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025

- ❖ Target kinerja RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.
- ❖ Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periodisasi RPJMN/RPJMD 2025-2030 dan RPJPN/RPJPD Tahun 2025-2045 dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045
- ❖ Pembangunan Feeder Tol Dharmasraya–Rengat akan menjadikan menjadikan Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu gerbang utama Provinsi Sumatera Barat Bagian Selatan (Kabupaten Solok bagian selatan, Pesisir Selatan serta Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi) ke Pusat Pertumbuhan Wilayah Tengah Pulau Sumatera.
- ❖ Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
- ❖ Kondisi pencapaian kinerja daerah tahun 2023 dan perkiraan pencapaian target tahun 2024 terhadap target kinerja tahunan dan target akhir RPJMD

Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

1. Rendahnya daya saing sumber daya manusia
2. Meningkatnya permasalahan sosial kemasyarakatan
3. Rendahnya daya saing perekonomian dan PDRB per kapita
4. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk
5. Belum optimalnya penerapan birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
6. Menurunnya kemampuan keuangan daerah
7. Belum maksimalnya dukungan infrastruktur dasar dan wilayah dalam mendukung pembangunan daerah
8. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025



Peningkatan daya saing
sumber daya manusia



Penguatan ketahanan
sosial masyarakat dan
budaya



Optimalisasi pengelolaan
dan hilirisasi sumber daya
alam

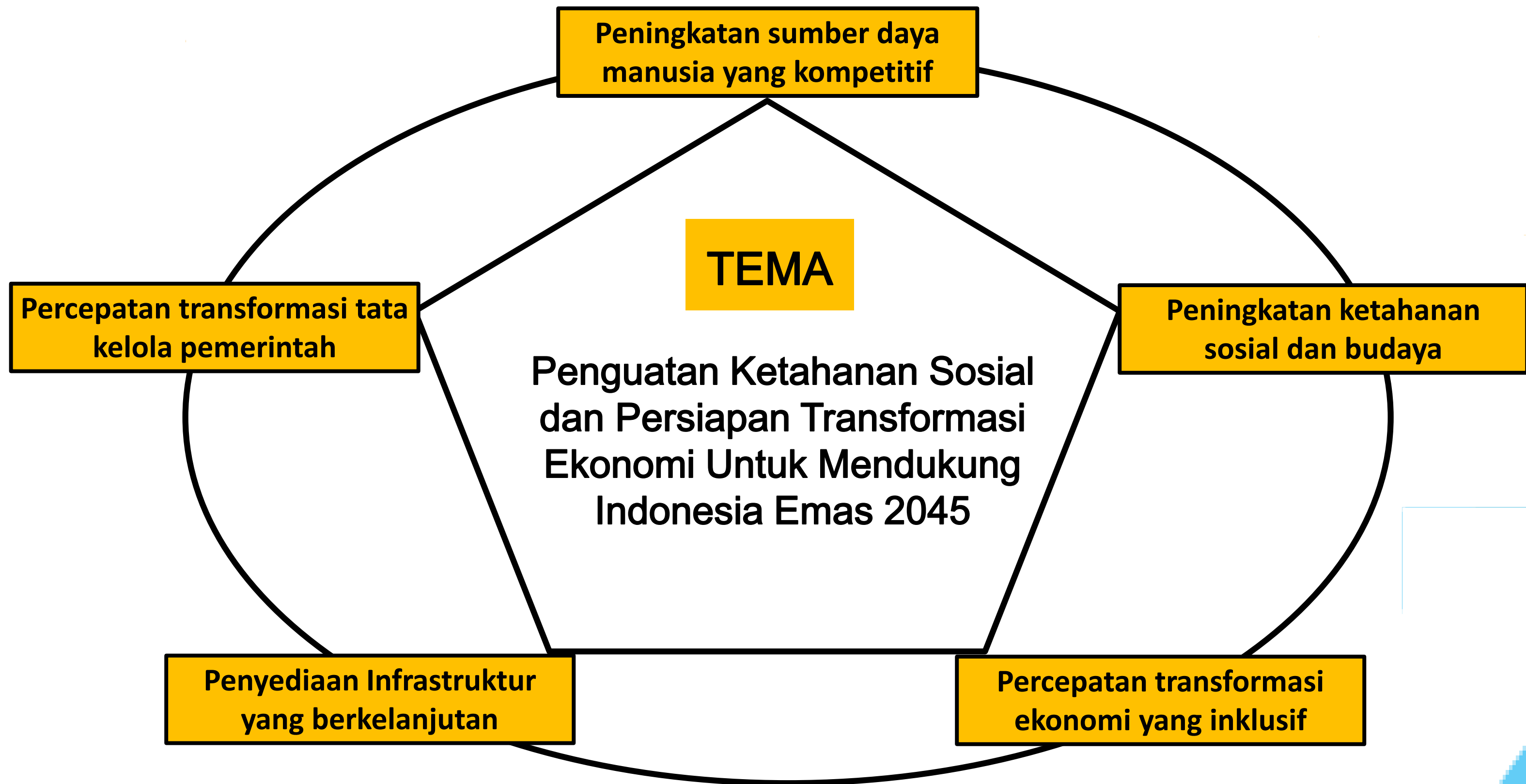


Penguatan tata kelola
pemerintah



Penyediaan Infrastruktur
dan Lingkungan Hidup

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025



KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 DENGAN RPJPN NASIONAL 2025-2045

Penguatan Ketahanan Sosial dan Persiapan Transformasi Ekonomi Untuk Mendukung Indonesia Emas 2045

1. Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif
2. Peningkatan ketahanan sosial dan budaya
3. Percepatan transformasi tata kelola pemerintah
4. Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif
5. Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan

VISI INDONESIA EMAS 2045

NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN SASARAN VISI

1. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara negara maju
2. Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan
3. Meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional
4. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia
5. Menurunnya intensitas Emisi GRK menuju net zero emission

VISI RPJPD SOLOK SELATAN 20245

SOLOK SELATAN MANDIRI, BERINTEGRITAS, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING UNTUK PEMBANGUNAN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN SASARAN

1. Peningkatan daya saing perekonomian daerah
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat
3. Tata kelola birokrasi pemerintahan baik
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
5. Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur

Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Kompetitif

Sasaran:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja

Arah kebijakan pembangunan:

1. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan (tenaga pendidik, dan sarana prasarana)
2. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)
3. Meningkatkan budaya literasi dan numerasi penduduk usia sekolah.
4. Meningkatkan layanan, keterjangkauan akses layanan serta dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
5. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi wanita produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita
6. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat
7. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas.
8. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi
9. Pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah .

Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Budaya

Sasaran:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
2. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PPKS
3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Meningkatkan peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan nagari dan daerah

Arah kebijakan pembangunan:

1. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah dan masyarakat.
2. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa
3. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat
4. Penurunan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan pendapatan
5. Peningkatan perlindungan dan ketahanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan disabilitas
6. Peningkatan dan menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sosial masyarakat

Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintah

Sasaran:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani

Arah kebijakan pembangunan:

1. Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme
2. Mengoptimalkan dan mengembangkan Teknologi Informasi bagi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis Teknologi Informasi
3. Meningkatkan manajemen kinerja ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif dan profesional
4. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP)
5. Membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
6. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus
7. Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik

Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif

Sasaran:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk (PDRB Perkapita)
3. Penurunan Pengangguran

Arah kebijakan pembangunan

1. Kepastian hukum dan kemudahan regulasi terkait investasi
2. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan berusaha
3. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja serta menumbuhkan wirausahawan baru
4. Meningkatkan produksi dan produktifitas ekonomi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
5. Meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi produk-produk unggulan daerah
6. Meningkatkan kualitas produk, perkuatan permodalan, peningkatan SDM pelaku UMKM
7. Mengembangkan ekonomi kreatif
8. Memperluas pasar produk UMKM melalui kerja sama dengan platform digital (e-Commerce) serta mengoptimalkan teknologi informasi
9. Meningkatkan fasilitasi kerjasama dan kemitraan antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar
10. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial

Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan

Sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan Partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari
3. Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur dasar masyarakat (air minum, sanitasi, persampahan dan telekomunikasi)
4. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan) dan penanganan pasca bencana
5. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air
7. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SOLOK SELATAN 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,47
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,76
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,43
Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 -15) Hafiz Qur'an		
a). 1 Juz	Persen	6,67
b). 2 Juz	Persen	0,69
c). Lebih atau sama 3 Juz	Persen	0,70
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,81
Prevalensi Stunting	Persen	13,2
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. Juta /Tahun	82,20
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03
Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,81
Indeks Gini Ratio	Indeks	0,280
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,52
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,00
Indeks SPBE	Indeks	2,74
Nilai/Predikat SAKIP	Indeks	85 (BB)
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,12
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.6

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025
Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	51
Indeks Ketersedian Infrastruktur Dasar	Indeks	78,60
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) /Rata-Rata Kab	Indeks	21,7
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,77
Pertumbuhan jumlah lembaga kesenian	Persen	5
Pertumbuhan jumlah klub / perkumpulan olahraga	Persen	5
Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kandung)	persen	92,11
Persentase lembaga Seni dan Budaya yang aktif	persen	59,14
Persentase klub / perkumpulan olahraga aktif	persen	100
Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	82,00
Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	82,00
Indeks Desa Membangun Persentase	Indeks	0,861
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,25
Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	Persen	100
Persentase Nagari Mandiri	Persen	42,55
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,25
Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persen	100,0

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN SOLOK SELATAN 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	71,47
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,52
3	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Juta/ Tahun	38,56
4	PDRB per kapita (Harga Konstan)	Juta/ Tahun	24,10
5	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Ribu/ Tahun	11.151
6	Indek Gini Ratio	Indek	0,28
7	Tingkat Pengangguran	%	5,03
8	Tingkat Kemiskinan	%	6,81
ASPEK PELAYANAN UMUM			
I	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan		
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,76
2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,43
3	Angka Melanjutkan		
	a.SD/MI ke SMP/MTs	%	100
	b.SMP/MTs ke SMA/AM/SMK	%	100
4	Angka Melek Huruf	%	99,5
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	a. TK/PAUD	%	72,28
	b.SD/MI/SDLB/Paket A	%	108,35
	c.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	100
6	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	100
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	84,35
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	74
7	Persentase guru bersertifikat Pendidik		
	a. SD/MI	%	96,15
	b. SMD/MTs	%	97,75
	c. SMA/MA	%	99,5
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,7
2.	Kesehatan		
1	Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	68,81
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	168
3	Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	6,1
4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,01
5	Prevalensi Balita Stunting	%	13,2
6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Type	B
7	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0,80
8	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	88,5
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	94
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	93

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
12	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95
13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95,8
14	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96
15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	77,5
16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	74
17	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	78
19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100
20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	18
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Persentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	50
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	31,2
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota (Akses air minum layak)	%	88,50
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses sanitasi layak)	%	66,37
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	%	100
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	48,89
8	Tingkat Kemantapan jembatan	%	88
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Persentase Rumah layak huni	%	92
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,01
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8
7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	55.89
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	Cakupan Penanganan Perda	%	100
2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	100

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN SOLOK SELATAN 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
3	Pencapaian Respon time	%	59,85
4	Persentase Penurunan Jiwa terdampak bencana	%	7,00
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	2000
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100
8	Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti	%	80
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
6	Urusan Sosial		
1	Persentase Cakupan Pelayanan PPKS	%	84
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Urusan Ketenagakerjaan		
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	2,12
2	Persentase tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan	%	22,82
3	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Berdasarkan ADHK)	%	47,0
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	17,95
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat		
1	Indek Pembangunan Gender	indeks	98,25
2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	100
3	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	12,68
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,0028
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.20
3	Urusan Pangan		
1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	10
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	85
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	131,06
4	Urusan Pertanian		
1	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan 9masyarakat dengan perusahaan/ pemerintah)	%	50
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100
3	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
5	Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,77
2	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	70
3	Persentase pengurangan sampah diwilayah kab	%	5
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	100
2	Perekaman KTP Elektronik	%	100
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	%	75
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	100
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	25
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa /Nagari	22
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	7,69
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	56,41
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Cakupan akseptor KB aktif	%	88
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,25
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,1
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	72
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	0
9	Urusan Perhubungan		
1	Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan lalin	Korban Meninggal Per 100 Kecelakaan	0,19
2	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,54
3	Persentase kinerja lalu lintas (V/C Ratio di jalan Kabupaten)	%	38,4
10	Urusan Komunikasi dan Informasi		
1	Nilai Indeks SPBE	Nilai	2,74
2	Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi	%	97,4
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	38
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	%	45
11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya (Koperasi Berkualitas)	%	8,7
2	Persentase KSP/USP Koperasi berprestasi	%	24,32
3	Persetase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	5
12	Urusan Penanaman Modal		
4	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	1,8

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI

KABUPATEN SOLOK SELATAN 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
1	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	%	50
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	20,75
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	20,75
4	Peningkatan prestasi olahraga Ø emas Ø Perak Ø Perunggu	Buah Buah Buah	10 14 16
13	Urusan Statistik		
1	Persentase jumlah elemen data sektoral yang dikelola	%	100
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
14	Urusan Persandian		
1	Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi	%	28
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100
15	Urusan Kebudayaan		
1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	136
2	Jumlah Sanggar Budaya dibina	Sanggar	93
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100
16	Urusan Perpustakaan		
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	3900
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	23
17	Urusan Kearsipan		
1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	60,61
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai Rata	44
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai Rata	4,05
III	Urusan Pilihan		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan		
1	Kontribusi Subsektor Perikanan thd Sektor Pertanian	Persen	1,43
2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ tahun	34,2
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	2758
2	Urusan Pariwisata		
1	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang siap dipasarkan	Objek	5
2	Persentase Pelaku ekraf yang dibina	%	15
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	15
5	Tingkat hunian akomodasi	%	55
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	25,8
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
3	Urusan Pertanian		
1	Kontribusi sektor pertanian	Persen	36,73
2	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan - Padi - Jagung - Kacang tanah - Manggis - Cabe - Bawang Merah - Kopi - Porang - Kelapa sawit - Populasi ternak besar - Telor	Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton ekor Ton	121320 101066 907 480 7530 4655 3862 220 72968 24754 470,03
3	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan kelas: a. Pemula b. Lanjut c. Madia d. Utama	Keltan Keltan Keltan Keltan	893 378 21 2
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,71
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	35,42
4	Urusan Energi Sumber Daya Mineral		
1	Cakupan pemanfaatan langsung panas bumi yang dibina	%	100
5	Urusan Perdagangan		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	21,6
2	Persentase peningkatan produk unggulan daerah (Lokal)	%	80
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	89
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	40
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	60
6	Urusan Perindustrian		
1	Kontribusi Sektor Perindustrian	%	5,2
2	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	%	5,8
3	Persentase pertumbuhan izin Industri	%	25
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	43
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	100
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN SOLOK SELATAN 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
IV	Fungsi Penunjang		
1	Perencanaan		
1	Persentase Pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)	%	86,67
2	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	%	89
3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	%	100
4	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100
5	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	%	88
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0
2	Penelitian dan Pengembangan		
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	50
3	Keuangan		
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
2	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100
3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	9,76
4	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	30,2
5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	2
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,75
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,95
8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0
9	Assets Management	Nilai	4
10	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	1,24
11	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100
12	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100
4	Kepegawaian		
1	Indeks Sistem Merit	indeks	325
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	44,4
4	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	55,98
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	66,77
5	Pelayanan Pemerintahan lainnya		
1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	78
2	Nilai LPPD	Nilai	3,1153
3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	100
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indek	Baik
5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	100
6	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	38
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	99
8	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	1
9	Maturitas SPIP	nilai	3,2
10	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	III



TERIMA KASIH